

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui analisis yang telah penulis lakukan dengan menggunakan perangkat *framing* Pan dan Kosicki, penulis menemukan *frame* yang digunakan *KR* untuk membingkai pemberitaan kasus pelanggaran hak BMP Sumiati. *KR* menampilkan *frame* bahwa peristiwa kekerasan (pelanggaran hak) terhadap Sumiati mendapat perhatian dari pemerintah dengan menonjolkan upaya hukum maupun kebijakan diplomasi yang diambil oleh pemerintah untuk menangani kasus tersebut.

Tindakan pemerintah ini dalam *frame KR* dilakukan karena pemerintah menilai perbuatan majikan Sumiati sudah di luar batas perikemanusiaan sehingga pemerintah menginginkan proses pengadilan yang tepat dan adil terhadap pelaku penyiksaan Sumiati. Terkait pernyataan sikap pemerintah Indonesia ini, *KR* juga memunculkan *frame* bahwa pemerintah Arab Saudi merespon positif upaya pemerintah Indonesia dengan berkomitmen akan menegakkan hukum untuk kasus Sumiati.

Selain itu, *KR* juga memunculkan *frame* bahwa pemerintah tidak hanya menindak kasus ini secara hukum tetapi juga akan turut melakukan pendampingan hukum terhadap Sumiati dan buruh migran lainnya yang bekerja di luar negeri. Selain menonjolkan upaya pemerintah, dalam *frame KR* juga terdapat kritik dan saran terhadap pemerintah yang berasal dari Ketua MPR RI, Ketua Komisi I DPR RI, dan Komisioner Komnas Perempuan sebagai representasi dari masyarakat. *KR*

memandang masalah kekerasan terhadap buruh migran khususnya perempuan terjadi akibat pemerintah tidak mempersiapkan para buruh migran tersebut dengan ketrampilan yang memadai (khususnya sebagai pembantu rumah tangga) dan tidak memiliki aturan yang tegas yang mampu menjamin perlindungan bagi warga negaranya untuk bekerja di luar negeri. *KR* menekankan masalah ini sebagai tanggung jawab pemerintah.

Sesuai dengan filosofi yang dianut *KR* yaitu “Suara Hati Nurani Rakyat” yang dapat dipahami bahwa dalam pemberitaannya *KR* selalu menempatkan diri sebagai koran yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam wacana mengenai kasus kekerasan terhadap BMP, *KR* menempatkan diri sebagai masyarakat sekaligus penyalur aspirasi masyarakat dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan buruh migran. *KR* juga memiliki kebijakan menyajikan berita-berita yang tidak mengandung unsur SARA, kecenderungan pencemaran nama baik, dan pelanggaran etika. *KR* juga memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan ruang dalam pemberitaannya terkait kasus ini. Adapun yang menjadi *input* pembentuk *frame* *KR* adalah perspektif individu (pandangan wartawan dan redaktur) serta kebijakan redaksi.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis mengalami sejumlah kendala dalam proses analisis teks maupun konteks. Kendala yang dihadapi saat melakukan analisis teks yaitu penulis kesulitan dalam menggali makna yang terkandung dari setiap kata atau kalimat yang diteliti sehingga terdapat kemungkinan penulis kurang tepat dalam menentukan *frame* dari masing-masing berita yang diteliti. Sementara pada

level konteks, penulis merasa hasil wawancara dengan narasumber kurang maksimal karena terdapat beberapa jawaban narasumber tidak sesuai dengan yang penulis tanyakan serta terbatasnya waktu narasumber untuk diwawancara.

Penulis juga hanya melihat *frame* dari satu media saja yaitu *KR*. Padahal isu ini adalah isu yang sifatnya nasional, sehingga dapat membandingkannya dengan dengan media lain baik media nasional maupun media lokal untuk melihat bagaimana perbandingan *frame* dari masing-masing media khususnya dalam melihat masalah-masalah yang menimpa BMP. Dengan menggunakan dua media dapat dibandingkan media mana yang pemberitaanya telah menaruh perhatian terhadap masalah-masalah perempuan dan memperjuangkan kepentingan BMP.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perangkat *framing* model Pan dan Kosicki yang lebih memfokuskan meneliti media melalui struktur bahasa yang digunakan dalam membingkai suatu realitas serta untuk memahami realitas. Sehingga tidak menutup kemungkinan isu ini dikaji dengan menggunakan metode lainnya seperti analisis isi kuantitatif atau analisis wacana. Misalnya, dengan analisis isi kuantitatif, masalah buruh migran perempuan dapat diteliti dengan menggunakan unit analisis seksisme bahasa¹, dan analisis wacana, untuk mengkritisi pemberitaan kekerasan buruh migran berdasarkan perspektif model analisis Theo Van Leeuwen misalnya, untuk melihat bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana di media massa dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya.

¹ Seksisme dalam bahasa menunjukkan bahwa bahasa itu tidak netral. Bahasa tidak sekedar menjadi alat untuk menuangkan ide-ide, tetapi ia juga pembentuk ide-ide. Seksisme dalam bahasa muncul dalam tiga bentuk: makna peyoratif, aturan semantik, dan penamaan. Lihat May Lan, *op.cit*, hal: 81

DAFTAR PUSTAKA

Buku

:

- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Demartoto, Argyo. 2009. *Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender; Menyoal TKW Indonesia Yang Akan Dikirim Ke Luar Negeri*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Eriyanto. 2002. *Analisis framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Kusumayudha, Oka dan kawan-kawan. 1996. *Amanat Sejarah, dari Pekik Merdeka hingga Suara Hati Nurani Rakyat*. Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Lan, May. 2002. *Pers, Negara, dan Perempuan*. Yogyakarta: Kalika.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Edisi 2. Jakarta: Erlangga
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Edisi 1. Jakarta: Modern English Press
- Siregar, Ashadi. 1988. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Siregar, Ashadi dan kawan-kawan. 1998. *Media dan Gender*. Yogyakarta : LP3Y dan The Ford Foundation
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosdakarya

Skripsi

:

- Eprilianty, Lidwina Chometa Halley. 2009. *Framing Opini Masyarakat Tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY: Analisis Framing Media atas Opini Narasumber sebagai representasi Masyarakat tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Periode*

2008-2013 dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja. FISIP. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Ginting, Juni Anastasia Windania. 2009. *Konstruksi Pemberitaan Atas Aksi Kekerasan Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB): Studi analisis Framing Pemberitaan Aksi Kekerasan Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Majalah Tempo*. FISIP. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Nayoan, Yoan AD. 2009. *Profiling Pelibat Wacana kelangkaan BBM di Banjarmasin dan sekitarnya: Analisis Framing Pencitraan Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan sekitarnya terkait perannya sebagai penyebab kelangkaan BBM dalam Pemberitaan SKH Banjarmasin Post periode 15 Juni-31 Juli*. FISIP. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Oktaviani, Santi. 2011. *Pengaruh Terpaan Berita Kasus TKI Terhadap Sikap Calon TKI Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Pengaruh Tingkat Terpaan Berita Kasus TKI Terhadap Sikap Calon TKI Untuk Bekerja Ke Luar Negeri)*. FISIP. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Palmasari, Fransiska Maria. 2007. *Relokasi Kawasan Parangtritis dalam Surat Kabar: Analisis Framing Pemberitaan Relokasi Kawasan Prangtritis dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja*. FISIP. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Utami, Pratiwi. 2007. *Framing Media Merekam Feminisme Indonesia: Analisis Framing terhadap Berita Bertema Feminisme di Harian Kompas Periode 1997-1999*. FISIP. Universitas Gadjah Mada. Skripsi.

Jurnal :

Prastyowati, Sri. 2009. 'Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Analisis terhadap Berita kasus Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Wanita' *Jurnal PKS*, Vol 8 (29), September, hal: 72-92

Setiansah, Mite. 2009. 'Politik Media dalam Membingkai Perempuan; Analisis Framing Pemberitaan Kasus Video Porno Yahya Zaini dan Maria Eva di Harian Umum *Kompas* dan *Suara Merdeka*' *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 (2), Desember, hal: 137-153.

Surjono, Gunanto. 2009. 'Permasalahan dan Pelayanan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi; Studi Kasus Pekerja Migran di Jeddah' *Jurnal PKS*, Vol 8 (29), September, hal : 3-23.

Artikel dalam internet :

Anshori, Mahfud. 2006. Prinsip-prinsip Jurnalistik Bingkai Berita Berisu Gender: Analsis Framing Harian Kompas dan Jawa Pos. (Diakses 24 November 2010) dari (<http://www.scribd.com/doc/10303805/Gender-Dan-Media#>).

Koran yang diteliti :

SKH *Kedaulatan Rakyat* :
Edisi 18 November 2010 : “Kerap Menyiksa dan Gunting Bibir: Penganiaya TKI di Arab Saudi Dtangkap”
Edisi 19 November 2010 : “Kasus Sumiati, Indonesia Kirim Nota Protes”
Edisi 20 November 2010 : “Dibunuh Majikan di Saudi Arabia: TKW tewas di Tong Sampah”
Edisi 25 November 2010 : “Penyaluran TKI Jadi Bisnis Mafia: Moratorium Bisa Picu Penyelundupan”
Edisi 29 November 2010 : “Komnas Perempuan Desak Penghentian: Pengiriman TKI ke Timur Tengah Diperketat ”



PT. BADAN PENERBIT

Kedaulatan Rakyat

WWW.kr.co.id
Email : redaksi @kr.co.id

REDAKSI

SURAT KETERANGAN

No. 496/I/Red-KR/9/2011

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs Octo Lampito, MPd
J a b a t a n : Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat
Alamat Kantor : Jl P Mangkubumi No. 40-42 Yogyakarta 55323
Telp (0274) 565685, Fax (0274) 563125

dengan ini menerangkan :

N a m a : Dwi Preti Natalia Tara' u
NIM : 070903375
Mahasiswa : Fakultas ISIP Program Studi Komunikasi Universitas Atma
Jaya Yogyakarta

nama tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan wartawan SKH Kedaulatan Rakyat, tanggal 25-26 April 2011 untuk tugas menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul "ISU PELANGGARAN HAK BURUH MIGRAN PEREMPUAN DALAM BINGKAI MEDIA (Analisis Framing Pemberitaan Isu Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan di Surat Kabar Harian SKH Kedaulatan Rakyat periode 18-29 November 2010".

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 September 2011

Pemimpin Redaksi,



Drs Octo Lampito, MPd

Ioc/At/Is

KERAP MENYIKSA DAN GUNTING BIBIR Penganiaya TKI di Arab Saudi Ditangkap

JAKARTA (KR) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Menlu Marty Natalegawa membentuk Tim Khusus yang akan mendampingi korban kasus kekerasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sumiati selama proses menjadi saksi pengadilan. Presiden juga memerintahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar untuk berangkat ke Arab Saudi.

"Kita menginginkan proses pengadilan yang tepat dan adil bagi pelaku penyiksaan TKI kita. Untuk Menteri Linda Gumelar, karena biasanya jika di negara Arab Saudi, perempuan dan laki-laki sangat dibedakan dan kebetulan beliau adalah Menteri PPPA sehingga mungkin akan lebih leluasa untuk melaksanakan pendampingan," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (16/11).

Seperti diketahui Sumiati yang berasal dari Dompu Bima Nusa Tenggara Barat menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Madinah sejak Juli 2010. Sepanjang bekerja, Sumiati kerap disiksa. Bahkan bibir bagian atasnya digunting. Sumiati mengalami luka berat pada sekujur tubuh, wajah dan kedua kakinya sehingga harus dirawat intensif di RS.

Kekejaman majikan Sumiati terkuak saat Sumiati dilarikan ke sebuah rumah sakit swasta di Madinah. Karena luka yang dideritanya sangat buruk, rumah sakit merujuknya

ke RS King Fahd di Madinah pada Senin 8 November. Kondisi Sumiati tidak sadar dengan luka di kepala hingga kaki. Kulit bibir dan kepalanya terkelupas, kedua kakinya nyaris tidak bisa digerakkan. Dia mengaku disetrika ibu dan anak perempuan majikannya.

Kasus Sumiati itu telah dilaporkan ke Kepolisian Distrik Madinah beberapa pekan lalu melalui RS King Fahd Madinah yang merawatnya. Majikan Sumiati yang tega berbuat kejam tengah diproses polisi.

Dalam rapat terbatas, Menlu Marty Natalegawa telah melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terhadap kasus penganiayaan yang menimpa Sumiati. "Menlu telah memanggil Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, dimana pemerintah Saudi Arabia sangat menyesalkan kejadian tersebut. Itu bukan cermin dari lembaga pemerintahnya secara institusi, tetapi dalam warga negara. Mereka berjanji akan menegakkan hukum kepada pelaku yang melakukan penyiksaan terhadap TKI kita," kata Djoko Suyanto.

Sementara Kemenakertrans akan mengirimkan tim pendamping untuk memfasilitasi keberangkatan perwakilan keluarga Sumiati ke Arab Saudi. Diharapkan kehadiran perwakilan keluarga ini dapat memberikan dorongan moril dan mempercepat pemulihan kesehatan Sumiati yang disiksa majikannya tersebut.

(Mgn/Sim/Ful)-f

Kedaulatan Rakyat, 18 November 2010

Halaman 8

Kasus Sumiati, Indonesia Kirim Nota Protes

JAKARTA (KR) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, majikan Sumiati di Arab Saudi harus bertanggung jawab secara hukum untuk kasus kasus Sumiati. Oleh karena itu, Kamis (18/11), Menakertrans memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdul Rahman Muhammad Amen Al Khayat untuk dimintai penjelasan tentang sikap pemerintah negara itu dalam kasus penganiayaan TKI Sumiati.

Sedangkan Wamenlu Tri-ono Wibowo kepada wartawan di Kantor Menko Kesra Jakarta mengatakan, Indonesia sudah mengirimkan nota protes ke pemerintah Saudi

Arabia. "Selain juga harus segera mengambil langkah hukum terhadap majikan atau pelaku penganiayaan terhadap Sumiati, melakukan pendampingan hukum ter-

hadap Sumiati dan juga TKI yang bekerja di luar negeri," jelasnya.

Terpisah, Ketua MPR RI Taufik Kiemas mendesak pemerintah untuk membenahi

tata cara mempekerjakan TKI di Arab Saudi. "Bakal majikannya itu harusnya datang ke KBRI untuk teken kontrak. Kemudian datang lagi memperpanjang lagi. Jadi terlindungi," ungkapnya.

Sedangkan Abdul Rahman Muhammad Amen Al Khayat, Dubes Saudi untuk Indonesia menuturkan, Pemerintah Arab Saudi berkomitmen menegakkan hukum untuk kasus Sumiati. (Ati/Ful/Edi)-f

Kedaulatan Rakyat, 19 November 2010

Halaman 7

HISIM KOMALASARI
DIBUNUH MARIKIN DI KOTA ABHA

TKW Tewas di Tong Sampah

JAKARTA (KR) - Belum lagi kasus Sumiati, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dompu NTB yang disiksa secara sadis oleh majikannya di Madinah Arab Saudi selesai, kini muncul kasus lebih mengenaskan. Kikim Komalasari, TKW asal Cianjur ditemukan tewas di tong sampah di Kota Abha Arab Saudi dan diduga dibunuh majikannya.

Kikim dibunuh 3 hari sebelum Hari Raya Idul Adha oleh majikannya di Kota Abha. Informasi awal soal tewasnya Kikim disampaikan salah satu relawan Posperki PDI Perjuangan yang berada di kota Abha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, peristiwa yang menimpa TKW itu sudah tidak bisa di-

tolerir lagi. "Saya anggap itu sudah di luar batas perike-manusiaan," tegasnya saat membuka rapat terbatas kabinet khusus menyangkut masalah TKI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/11).

Pemerintah, tegas SBY, akan ambil beberapa langkah terlebih dahulu terhadap dua peristiwa yang menimpa TKI di Saudi Arabia itu. Pertama, melakukan investigasi. "Kita ingin memastikan bahwa kedua insiden ini betul-betul dilakukan investigasi secara tuntas," ujarnya.

Yang kedua, kerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia terus dilakukan. Pihak Saudi Arabia memang sudah menunjukkan sikap positif. "Paling tidak sudah menahan
* Bersambung hal 7 kol 6

TKW Tewas Sambungan hal 1

dan meminta keterangan dari pihak yang mempekerjakan saudari kita di Saudi Arabia itu," tandas SBY.

Diakui, pemerintah memang seringkali terlambat untuk mengetahui informasi sekitar adanya kasus serius yang dihadapi para TKI. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah sedang merumuskan untuk memberikan telepon genggam atau HP kepada TKI. "Mereka akan diberitahu kepada siapa harus disampaikan bila ada masalah seperti itu, apakah itu perwakilan kita, konsulat jenderal, dubes, atau pihak di dalam negeri," tambah SBY.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga sedang mengkaji moratorium (jeda) pengiriman TKI ke Arab Saudi. Jangan sampai moratorium itu menimbulkan masalah TKI ilegal. "Kita harus sangat peduli dan memberi perlindungan, bagaimana ke depan apa langkah yang diambil secara moratorium atau langkah lainnya tentu harus kita kaji dengan seksama," tegas Menlu Marty Natalegawa. (Mgn/Ful/Sim/Edi)-f

Penanganan Sambungan hal 1

Pembiayaan juga banyak yang menawarkan. Jika dimulai dari syarat teknisnya, UGM melihat minimal rumah ukuran 18 meter persegi untuk satu keluarga sudah mencukupi. Sedang jika rumah permanen sebaiknya merupakan rumah tumbuh.

Sementara itu, Aris Wismadi dari pusat Studi Transportasi dan logistik (Pustral) UGM, mengusulkan konsep sistem jaringan. Jaringan fisik, meliputi *shleter*, infrastruktur yang meliputi jalan, telekomunikasi air bersih, dan sebagainya. Kemudian jaringan bergerak, antara lain jaringan pendukung yang meliputi layanan kesehatan keliling, akses keuangan pada saat normal atau tak ada bencana. (Tim KR)-b

Kedaulatan Rakyat, 20 November 2010

Halaman 1

KR. 25 NOV 2010

PENYALURAN TKI JADI BISNIS MAFIA

Moratorium Bisa Picu Penyelundupan

JAKARTA (KR) - Pemerintah mengkhawatirkan wacana moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bisa memicu penyelundupan TKI. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, moratorium tersebut bisa membuka ruang bagi pengiriman TKI secara ilegal.

"Kita harus berhati-hati dalam mempersiapkan wacana moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Bisa saja ada oknum yang mengirimkan TKI dengan jalur ilegal disebabkan adanya aturan penghentian sementara dari pemerintah. Hal itu akan lebih membahayakan nasib TKI bersangkutan karena pengirimannya tidak diketahui pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

untuk mengusut dugaan kuat mengenai adanya mafia penyaluran TKI. Diharapkan Pansus ini mampu memberikan jaringan pengiriman TKI. "Kita akan dorong ke pansus, bisa lintas komisi," katanya.

Terkait masalah ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR juga telah mengeluarkan adanya mafia TKI yang menyulurkan TKI tidak profesional ke luar negeri untuk kepentingannya sendiri. Dalam pansus tersebut, Mahfudz menuturkan akan dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kelemahan pemerintah dalam hal mekanisme penyaluran TKI

ke luar negeri.

Diharapkan, demikian Mahfudz Siddiq, Pansus akan menemukan jawaban atas keluhan pemerintah dalam hal perlindungan TKI ke luar negeri. Pansus nantinya akan memberikan masukan kepada pemerintah dan melakukan pembenahan mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri.

"Pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis PJTKI. Kedua, pemerintah juga jangan kemudian mengambil manfaat dari keberadaan TKI ketika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja. Ini kan tugas negara," ujarnya. (Ari/E/di)-a

Kedaulatan Rakyat, 25 November 2010
Halaman 8

1 Nov 2010

KOMNAS PEREMPUAN DESAK PENGHENTIAN

Pengiriman TKI ke Timur Tengah Diperketat

JAKARTA (KR) - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permintaan itu disampaikan terkait maraknya kasus penganiayaan TKI di luar negeri, terakhir Sumiati asal NTB yang menjadi korban penganiayaan matikannya di Arab Saudi.

"Hentikan sementara pengiriman TKI, sampai benar-benar disiapkan perjanjian," kata Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afifah di Jakarta, Minggu (28/11).

Ditegaskan, Indonesia harus memiliki perjanjian yang tegas dengan negara tujuan TKI. Setelah itu kedua belah pihak harus memiliki komitmen untuk memenuhi perjanjian

bersama tersebut. Pemerintah harus memperbaiki kebijakan, artinya kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus benar-benar tegas dan konsisten.

"Kalau terjadi permasalahan terhadap TKI, tindakannya hanya responsif. Tidak antisipatif terhadap kekerasan yang akan terjadi selanjutnya," kata Neng Dara.

Terkait masalah TKI ini,

"Karena itu dalam rapat koordinasi membahas penyempurnaan sistem, kita juga akan melakukan pengamatan terhadap pengiriman TKI ke Timur Tengah," kata Muhaimin.

Melalui rakor ini, Muhaimin juga meminta peningkatan peran perlindungan terhadap TKI di luar negeri. "Saya juga meminta ke semua pihak yang terlibat untuk ikut meningkatkan upaya perlindungan," tuturnya sambil berharap dari rakor ini terjadi sinergi, ketaatan pada sistem dan juga peran lebih aktif terhadap perlindungan TKI.

Kedalaman Rakeyat, 29 November 2010
Halaman 8

A. Informasi umum			
Nama Media	SKH Kedaulatan Rakyat		
Hari/ Tanggal	18 Nopember 2010		
Halaman	8		
Judul	KERAP MENYIKSA DAN GUNTING BIBIR Penganiaya TKI di Arab Saudi Ditangkap		
Jumlah Alinea	7		
Penulis Berita	(Mgn/Sim/Ful)-f		
B. Jenis Berita			
Berita Langsung			
C. Analisis Teks			
ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
Obyek wacana Perintah presiden SBY terhadap Menlu Marty Natalegawa untuk membentuk Tim Khusus dan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar untuk berangkat ke Arab Saudi dalam rangka mendampingi korban kasus kekerasan Tenaga Kerja	Jenis wacana a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap TKI Sumiati terkait proses pengadilan kasus penyiksaan terhadapnya. 1. <i>Lead</i> : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Menlu Marty Natalegawa membentuk Tim	Placement Berita ini membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendampingi Sumiati sebagai korban kekerasan selama proses menjadi saksi pengadilan sebagai upaya perlindungan hukum dan penegakkan keadilan. Upaya pemerintah ini disampaikan oleh	Keywords Kata “memerintahkan” yang dipergunakan dalam pemaparan di paragraf satu menegaskan suatu tindakan dari yang berkuasa (Presiden) kepada bawahannya (Menteri). Istilah “memerintahkan” yang digunakan oleh wartawan di sini menunjukkan tingkat

<p>Indonesia (TKI) Sumiati selama menjadi saksi pengadilan. (<i>lead/</i> paragraf 1)</p> <p>Pelibat wacana</p> <p>1. Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani proses hukum (pengadilan) kasus penyiksaan yang menimpa TKI Sumiati dengan menugaskan para menteri terkait sesuai dengan bidang kerja masing-masing.</p> <p>2. TKI Sumiati Sumiati merupakan salah seorang tenaga kerja di Arab Saudi dan menjadi korban penyiksaan oleh majikannya.</p> <p>3. Majikan Sumiati</p>	<p>Khusus yang akan mendampingi korban kasus kekerasan TKI Sumiati selama proses menjadi saksi pengadilan... memerintahkan Menteri PPPA, Linda Gumelar untuk berangkat ke Arab Saudi.</p> <p>2. Par. 2: “Kita menginginkan proses pengadilan yang tepat dan adil bagi pelaku penyiksaan TKI kita. Untuk Menteri Linda Gumelar, karena biasanya di Negara Arab Saudi, perempuan dan laki-laki sangat dibedakan dan kebetulan beliau adalah Menteri PPA sehingga mungkin akan lebih leluasa untuk melaksanakan pendampingan.”</p> <p>3. Par. 6: “Menlu telah</p>	<p>Djoko Suyanto (Menko Polhukam) dalam par. 1, 2, 6, dan par. 7.</p> <p>Selanjutnya berita ini juga membahas mengenai kronologi peristiwa terungkapnya kasus tersebut di kepolisian (par. 4 dan 5), kondisi Sumiati (par. 3), dan kondisi majikan/penyiksa (par. 5)</p>	<p>keseriusan yang lebih tinggi daripada sekedar “menyuruh”. Hal ini berarti bahwa para Menteri harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden terkait penanganan kasus kekerasan yang menimpa TKI Sumiati.</p> <p>Kata “mendampingi” menunjukkan bahwa para Menteri yang mendapat tugas tersebut harus selalu bersama korban dalam proses pengadilan. “Mendampingi” bermakna menemani atau menyertai dekat-dekat “Mendampingi” berarti senantiasa berada disisi orang</p>
---	--	--	--

<p>Merupakan aktor yang melakukan penyiksaan.</p> <p>Pelantun wacana</p> <p>1. Djoko Suyanto (Menko Polhukam)</p> <p>Pelantun di atas sebagai satu-satunya pihak yang dimintai keterangan oleh wartawan berkaitan tindakan pemerintah atas kasus penyiksaan TKI Sumiati dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden. Pelantun di atas sebagai bagian dari pemerintah yang menjelaskan tugas Menlu, Menteri PPPA, dan Kemenakertrans terkait proses hukum TKI Sumiati. Kepentingan pernyataannya adalah mewakili</p>	<p>memanggil Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, dimana pemerintah Saudi Arabia sangat menyesalkan kejadian tersebut. Itu bukan cermin dari lembaga pemerintahnya secara institusi, tetapi dalam warga Negara. Mereka berjanji akan menegakkan hukum kepada pelaku yang melakukan penyiksaan terhadap TKI kita.”</p> <p>4. Par. 7 : ...Kemenakertrans akan mengirimkan tim pendamping untuk memfasilitasi keberangkatan perwakilan keluarga Sumiati ke Arab Saudi... Pernyataan-pernyataan di atas diungkapkan oleh pelantun 1 Djoko Suyanto (Menko</p>		<p>yang di dampingi bukan hanya sekedar “mengawasi”.</p> <p>Depiction</p> <p>“... Sepanjang bekerja, Sumiati kerap disiksa.”</p> <p>Kalimat ini menunjukkan bahwa Sumiati selalu mengalami kekerasan saat bekerja. Kata “kerap disiksa” menunjukkan bahwa tindakan penyiksaan tersebut terjadi secara berulang-ulang.</p> <p>“... Kekejaman Majikan Sumiati...”</p> <p>Kalimat di atas menunjukkan bahwa tindakan Majikan Sumiati dikategorikan sebagai</p>
---	--	--	---

<p>pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi TKI Sumiati.</p> <p>2. Wartawan</p> <p>Dalam berita wartawan menjelaskan latar belakang Sumiati, mendeskripsikan bentuk kekerasan yang dialami, serta menjelaskan kronologi terungkapnya peristiwa tersebut.</p>	<p>Polhukam) yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus ini. Pelantun menjelaskan siapa saja menteri yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai Tim Khusus yang akan mendampingi korban sebagai saksi dalam proses pengadilan. Pelantun juga menjelaskan apa saja tindakan yang dilakukan oleh para menteri yang bertanggung jawab terhadap kasus ini.</p> <p>b. Penjelasan mengenai identitas Sumiati;</p> <p>1. Par. 3: Seperti diketahui Sumiati yang berasal dari Dompu Bima Nusa Tenggara Barat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Madinah sejak Juli</p>		<p>tindakan yang tidak berperikemanusiaan.</p> <p>“...Sumiati mengalami luka berat pada sekujur tubuhnya...”</p> <p>Kalimat di atas menunjukkan bahwa penyiksaan tersebut menyebabkan Sumiati menderita luka yang sangat serius di seluruh tubuhnya.</p> <p>“...luka yang dideritanya sangat buruk...”</p> <p>Kalimat di atas merupakan penjelasan atas kondisi fisik Sumiati setelah mengalami penyiksaan. Kata “sangat buruk” yang digunakan</p>
--	--	--	--

	<p>2010.</p> <p>bentuk kekerasan yang dialami;</p> <p>2. Par. 3: ...Sepanjang bekerja, Sumiati kerap disiksa. Bahkan bibir bagian atasnya digunting. Sumiati mengalami luka berat pada sekujur tubuh, wajah dan kedua kakinya sehingga harus dirawat intensif di RS.</p> <p>3. Par. 4 : ... Kondisi Sumiati tidak sadar dengan luka di kepala hingga kaki. Kulit bibir dan kepalanya terkelupas, kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Dia mengaku disetrika ibu dan anak perempuan majikannya.</p> <p>serta kronologi terungkapnya peristiwa tersebut;</p>		<p>menunjukkan bahwa luka yang ada menyebabkan keadaan fisiknya menjadi tidak baik atau tampak memperhatikan.</p>
--	--	--	---

	<p>4. Par. 4 : Kekejaman majikan Sumiati terkuak saat Sumiati dilarikan ke sebuah rumah sakit swasta di Madinah. Karena luka yang dideritanya sangat buruk, rumah sakit merujuknya ke RS King Fahd di Madinah pada Senin 8 November.</p> <p>5. Par. 5 : Kasus Sumiati itu telah dilaporkan ke Kepolisian Distrik Madinah beberapa pekan lalu melalui RS King Fahd Madinah yang merawatnya. Majikan Sumiati yang tega berbuat kejam tengah diproses polisi.</p> <p>Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pengungkapan fakta oleh wartawan mengenai kondisi</p>		
--	---	--	--

	<p>pelibat wacana (Sumiati) . Pernyataan “<i>seperti diketahui</i>” pada awal paragraf tiga menunjukkan bahwa peristiwa ini telah menjadi konsumsi publik sebelumnya dan dijadikan wartawan sebagai tambahan/ pelengkap informasi.</p>		
<p>FRAME SELEKSI : Berdasarkan analisis pada struktur skriptural dan tematis, <i>frame</i> yang dipilih oleh <i>KR</i> adalah memberitakan perintah/ penugasan Presiden kepada para menteri terkait untuk bertindak atas kasus kekerasan yang menimpa Sumiati.</p>		<p>FRAME SALIANSI: Dalam berita tersebut <i>KR</i> menonjolkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani proses hukum demi keadilan TKI Sumiati yang menjadi korban kekerasan. <i>KR</i> juga menonjolkan bentuk kekerasan yang dialami oleh Sumiati.</p>	
<p>MEDIA FRAME KR cenderung membingkai kasus kekerasan terhadap TKI Sumiati sebagai peristiwa yang mendapat perhatian dari pemerintah dengan tetap menyajikan bentuk kekerasan yang dialami oleh Sumiati.</p>			

A. Informasi umum			
Nama Media	SKH Kedaulatan Rakyat		
Hari/ Tanggal	19 Nopember 2010		
Halaman	7		
Judul	Kasus Sumiati, Indonesia Kirim Nota Protes		
Jumlah Alinea	4		
Penulis Berita	(Ati/Ful/Edi)-f		
B. Jenis Berita		Berita Langsung	
C. Analisis Teks			
ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Obyek wacana</p> <p>Pernyataan Menakertrans Muhamin Iskandar bahwa majikan Sumiati di Arab Saudi harus bertanggung jawab secara hukum untuk kasus kasus Sumiati. (<i>lead</i>/ paragraf 1)</p> <p>Pelibat wacana</p> <p>a. Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat dalam hal ini</p>	<p>Jenis wacana</p> <p>1. Sikap pemerintah Indonesia terhadap kasus TKI Sumiati.</p> <p>1. Judul : Kasus Sumiati, Indonesia Kirim Nota Protes</p> <p>2. <i>Lead</i> : ...majikan Sumiati di Arab Saudi harus bertanggung jawab secara hukum untuk kasus Sumiati... memanggil Duta Besar</p>	<p>Placement</p> <p>Berita ini membahas sikap pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi terkait masalah TKI di Negara tersebut khususnya kasus penyiksaan TKI Sumiati. Sikap pemerintah ini disampaikan oleh Menakertrans (par. 1/ <i>lead</i>) dan Wamenlu (par. 2), serta terdapat pada judul.</p>	<p>Depiction</p> <p>... majikan Sumiati di Arab Saudi harus bertanggung jawab secara hukum untuk kasus Sumiati... (par. 1/ <i>lead</i>)</p> <p>Kalimat penjabaran di atas menegaskan bahwa majikan Sumiati telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga harus</p>

<p>diwakili oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Wamenlu Triono menyatakan sikapnya terhadap pemerintah Arab Saudi terkait kasus penyiksaan TKI Sumiati dengan memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia serta mengirimkan nota protes ke pemerintah Arab Saudi.</p> <p>b. Dubes Saudi untuk Indonesia Abdul Rahman Al Khayat Pelibat di atas merupakan bagian dari pemerintah Arab Saudi yang bertugas di Indonesia sehingga wajib memberi penjelasan kepada pemerintah Indonesia mengenai sikap Negara Arab Saudi terhadap kasus penganiayaan TKI Sumiati.</p>	<p>Arab Saudi untuk Indonesia... untuk dimintai penjelasan tentang sikap negara itu dalam kasus penganiayaan TKI Sumiati.</p> <p>3. Par. 2 : ...Indonesia sudah mengirimkan nota protes ke pemerintah Saudi Arabia. “Selain juga harus segera mengambil langkah hukum terhadap majikan atau pelaku penganiayaan terhadap Sumiati, melakukan pendampingan hukum terhadap Sumiati juga TKI yang bekerja di luar negeri”</p> <p>Pernyataan-pernyataan di atas diungkapkan oleh pelantun 1 Muhaimin Iskandar (Menakertrans) dan pelantun 2 Triono Wibowo (Wamenlu),</p>	<p>Selanjutnya berita ini juga membahas mengenai tanggapan dari pemerintah Arab Saudi yang diwakili oleh Dubes Arab Saudi untuk Indonesia (par. 4)</p> <p>Berita ini juga menampilkan pendapat dari Ketua MPR yang mendesak pemerintah untuk membenahi tata cara mempekerjakan TKI (par. 3)</p>	<p>diproses sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>... mendesak pemerintah untuk membenahi tata cara mempekerjakan TKI di Arab Saudi... (par. 3)</p> <p>Kalimat penjabaran di atas menunjukkan bahwa ada aturan-aturan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia ketika mempekerjakan TKI di Arab Saudi. Kata “mendesak” menunjukkan bahwa pembenahan tersebut harus segera dilaksanakan.</p> <p>Catchphrases</p>
--	---	---	---

<p>Pelantun wacana</p> <p>a. Menakertrans Muhaimin Iskandar</p> <p>Menakertrans merupakan bagian dari pemerintah pusat yang berkewajiban mengurus bidang tenaga kerja sehingga turut bertanggung jawab atas kasus hukum TKI Sumiati.</p> <p>Kepentingan pernyataannya adalah sebagai upaya meminta pertanggungjawaban majikan Sumiati secara hukum terhadap kasus penyiksaan yang dilakukannya terhadap Sumiati.</p> <p>b. Wamenlu Triono Wibowo</p> <p>Wamenlu juga merupakan aparat pemerintah yang turut mengurus proses hukum TKI Sumiati.</p>	<p>menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani kasus ini.</p> <p>b. Sikap pemerintah Arab Saudi terhadap kasus penyiksaan TKI Sumiati.</p> <p>1. Par 4 : ...Pemerintah Arab Saudi berkomitmen menegakkan hukum untuk kasus Sumiati.</p> <p>Pernyataan ini diungkapkan oleh pelantun 4 Abdul Rahman Muhammad Al Khayat (Dubes Saudi untuk Indonesia), menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi merespon upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.</p> <p>c. Masukan bagi pemerintah terkait tata cara mempekerjakan</p>		<p>“Nota Protes” merupakan surat peringatan resmi dari pemerintah Indonesia yang berisi protes keras dari Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi atas masalah penyiksaan TKI yang terjadi di Negara tersebut. Namun demikian, cara ini dianggap dapat menyelesaikan persoalan yang sifatnya sementara, tidak untuk jangka panjang, tergantung dari kemampuan diplomasi Negara Indonesia.</p> <p>Keywords</p> <p>Kata “berkomitmen” bermakna “janji” atau “berjanji”. Hal ini berarti pemerintah Arab Saudi</p>
---	---	--	---

<p>Kepentingannya pernyataannya juga menjelaskan langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus Sumiati yakni dengan mengirimkan nota protes kepada pemerintah Arab Saudi serta melakukan pendampingan terhadap Sumiati serta TKI lainnya yang bekerja di luar negeri.</p> <p>c. Ketua MPR RI Taufik Kiemas Pelantun di atas sebagai pihak yang mendesak pemerintah untuk membenahi tata cara mempekerjakan TKI di Arab Saudi.</p> <p>d. Dubes Arab Saudi Abdul Rahman Muhammad Amen Khayat</p>	<p>TKI di Arab Saudi</p> <p>1. Par. 3: ...mendesak pemerintah untuk membenahi tata cara mempekerjakan TKI di Arab Saudi. “Bakal majikannya itu harusnya datang ke KBRI untuk teken kontrak. Kemudian datang lagi untuk memperpanjang lagi. Jadi terlindungi”</p> <p>Pernyataan di atas dilantunkan oleh pelantun 3 Taufik Kiemas (Ketua MPR RI). Pernyataan tersebut berfungsi sebagai informasi tambahan mengenai tindakan yang harus dilakukan pemerintah terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi. Kata “mendesak pemerintah” menunjukkan bahwa MPR</p>		<p>benar-benar akan menegakkan hukum terhadap kasus Sumiati.</p>
--	---	--	--

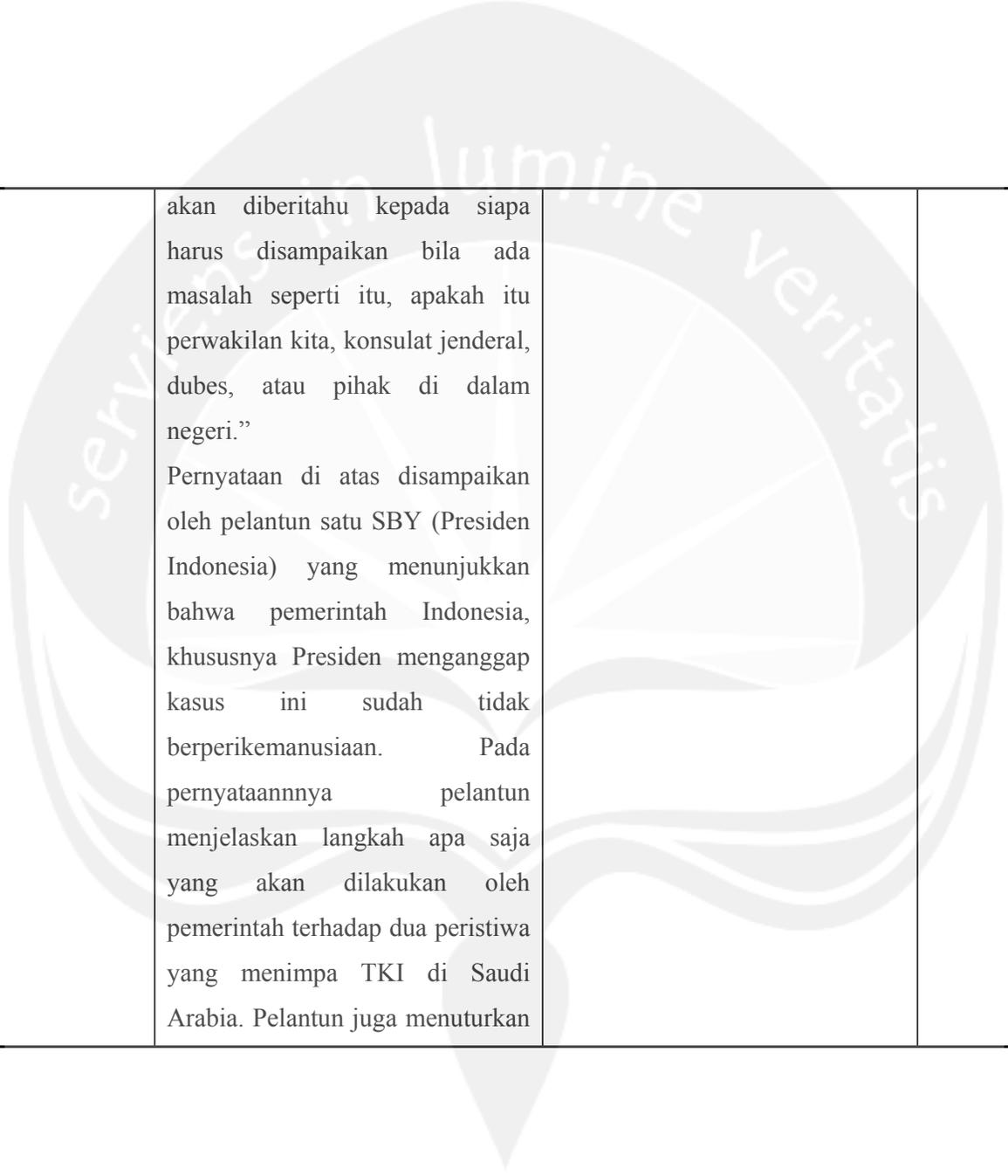
<p>Pelantun di atas sebagai pihak yang mewakili pemerintah Arab Saudi menyatakan komitmen Negara tersebut untuk menegakkan hukum atas kasus Sumiati.</p>	<p>menginginkan pemerintah agar segera bertindak.</p>		
<p>FRAME SELEKSI : Berdasarkan analisis pada struktur skriptural dan tematis ditemukan bahwa <i>frame</i> yang dipilih <i>KR</i> adalah memberitakan pernyataan sikap pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terkait kasus penyiksaan TKI Sumiati.</p>		<p>FRAME SALIANSI: <i>KR</i> menonjolkan bentuk tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam rangka penegakkan hukum kasus penyiksaan TKI Sumiati.</p>	
<p>MEDIA FRAME KR cenderung membingkai bahwa kasus penyiksaan TKI Sumiati menuai reaksi dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi.</p>			

A. Informasi umum			
Nama Media	SKH Kedaulatan Rakyat		
Hari/ Tanggal	20 Nopember 2010		
Halaman	1		
Judul	DIBUNUH MAJIKAN DI SAUDI ARABIA TKW Tewas di Tong Sampah		
Jumlah Alinea	7		
Penulis Berita	(Mgn/Ful/Sim/Edi)-f		
B. Jenis Berita	Berita Langsung		
C. Analisis Teks			
ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Obyek wacana</p> <p>TKW asal Cianjur Kikim Komalasari ditemukan tewas di tong sampah di Kota Abha Arab Saudi dan diduga dibunuh majikannya. (Par. 1/ <i>lead</i>)</p> <p>Pelibat wacana</p> <p>a. Pemerintah Pusat</p> <p>1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)</p>	<p>Jenis wacana</p> <p>a. Beruntutnya kasus kekerasan yang dialami TKW Indonesia di Arab Saudi.</p> <p>1. Judul : DIBUNUH MAJIKAN DI SAUDI ARABIA, TKW Tewas di Tong Sampah</p> <p>2. <i>Lead</i> : “Belum lagi kasus Sumiati... yang disiksa secara sadis oleh majikannya di Madinah</p>	<p>Placement</p> <p>Berita ini membahas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dua peristiwa kekerasan yang menimpa TKW Indonesia di Arab Saudi. Langkah atau kebijakan ini disampaikan oleh Presiden SBY (par. 4, 5, dan 6), serta Menlu Marty Natalegawa</p>	<p>Depiction</p> <p>...kasus lebih mengenaskan... (<i>lead</i>).</p> <p>Kalimat penjabaran di atas seolah menjelaskan bahwa kasus dibunuhnya Kikim merupakan peristiwa yang lebih memperhatikan dibanding peristiwa sebelumnya (kasus Sumiati).</p>

<p>2. Menlu Marty Natalegawa Pemerintah pusat merupakan pihak yang mengambil kebijakan atas kasus penyiksaan TKW Sumiati tewasnya Kikim Komalasari di Arab Saudi.</p> <p>b. TKW Kikim Komalasari Kikim Komalasari merupakan salah seorang tenaga kerja Indonesia dan menjadi korban pembunuhan majikan di Arab Saudi.</p> <p>Pelantun wacana</p> <p>a. Presiden SBY SBY sebagai kepala Negara menyatakan sikapnya atas kasus kekerasan yang menimpa dua TKW Indonesia di Arab Saudi. SBY menjelaskan sejumlah</p>	<p>Arab Saudi selesai, kini muncul kasus lebih mengenaskan. ... Kikim Komalasari ditemukan tewas di tong sampah di Kota Abha Arab Saudi dan diduga dibunuh majikannya”</p> <p>3. Par 2 : “Kikim dibunuh 3 hari sebelum Hari Raya Idul Adha oleh majikannya di Kota Abha...”</p> <p>Pernyataan di atas merupakan pemaparan informasi seputar bentuk kekerasan, identitas korban kekerasan, pelaku kekerasan, serta informasi tempat dan waktu terjadinya pembunuhan yang disampaikan oleh pelantun tiga. Kalimat penjabaran “Belum lagi kasus Sumiati... selesai, ...muncul kasus...” yang</p>	<p>(par. 7). Selain itu berita ini juga berisi informasi tentang peristiwa kekerasan itu sendiri (Judul, <i>lead</i>, dan par. 2)</p>	<p>Kata “mengenaskan” yang digunakan wartawan pada artikel ini menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi dari sekedar “menyedihkan” atau “memilukan”. Hal ini berarti bahwa kasus tewasnya Kikim merupakan peristiwa yang sangat tidak manusiawi.</p> <p>...sudah tidak bisa ditolerir... (par. 3).</p> <p>Kalimat di atas menunjukkan bahwa peristiwa yang menimpa kedua TKW tersebut merupakan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan/ditoleransi lagi sehingga diperlukan proses hukum untuk</p>
--	---	---	---

<p>kebijakan jangka panjang dan jangka pendek yang akan diambil terkait kasus tersebut. Kepentingan pernyataannya adalah sebagai penjelasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas kasus kekerasan yang menimpa kedua TKW tersebut.</p> <p>b. Menlu Marty Natalegawa Menlu Marty Natalegawa menjelaskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian Luar Negeri terkait pengiriman TKI ke Arab Saudi.</p> <p>c. Wartawan Dalam berita wartawan memberikan informasi seputar</p>	<p>digunakan oleh wartawan pada paragraf pertama menjelaskan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan.</p> <p>b. Reaksi Presiden SBY atas kasus kekerasan yang dialami kedua TKW Indonesia, disertai pengambilan beberapa kebijakan terkait penanganan masalah TKI di Arab Saudi.</p> <p>a. Par. 3 : Presiden SBY menilai, peristiwa yang menimpa TKW itu sudah tidak bisa di tolerir lagi. “Saya anggap itu sudah di luar batas kemanusiaan,” tegasnya...</p> <p>b. Par. 4 : Pemerintah... akan</p>		mendapatkan keadilan.
---	--	--	-----------------------

<p>tewasnya Kikim Komalasari.</p>	<p>mengambil beberapa langkah terlebih dahulu terhadap dua peristiwa yang menimpa TKI di Saudi Arabia... Pertama, melakukan investigasi. “Kita ingin memastikan bahwa kedua insiden ini betul-betul dilakukan investigasi secara tuntas.”</p> <p>c. Par. 5 : Yang kedua, kerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia terus dilakukan... “Paling tidak sudah menahan dan meminta keterangan dari pihak yang mempekerjakan saudara kita di Saudi Arabia itu.”</p> <p>d. Par. 6 : ... Pemerintah sedang merumuskan untuk memberikan telepon genggam atau HP kepada TKI. “Mereka</p>		
-----------------------------------	--	--	--



	<p>akan diberitahu kepada siapa harus disampaikan bila ada masalah seperti itu, apakah itu perwakilan kita, konsulat jenderal, dubes, atau pihak di dalam negeri.”</p> <p>Pernyataan di atas disampaikan oleh pelantun satu SBY (Presiden Indonesia) yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Presiden menganggap kasus ini sudah tidak berperikemanusiaan. Pada pernyataannya pelantun menjelaskan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap dua peristiwa yang menimpa TKI di Saudi Arabia. Pelantun juga menuturkan</p>		
--	--	--	--

	<p>rencana pemberian HP kepada TKI agar para TKI bisa melapor dengan cepat kepada pihak-pihak terkait jika suatu saat mengalami kekerasan.</p> <p>e. Par. 7 : Kementrian Luar Negeri juga sedang mengkaji moratorium (jeda) pengiriman TKI ke Arab Saudi... “Kita harus sangat peduli dan memberi perlindungan, bagaimana kedepan apa langkah yang diambil secara moratorium atau langkah lainnya tentu harus kita kaji dengan seksama.”</p> <p>Pernyataan di atas disampaikan oleh pelantun dua Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri) sebagai pelengkap atas langkah</p>		
--	--	--	--

	yang diambil pemerintah, yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden.		
FRAME SELEKSI: <i>KR</i> memberitakan penilaian presiden terhadap kedua peristiwa kekerasan yang menimpa TKW Indonesia di Arab Saudi.tersebut sebagai insiden yang tidak bisa dimaafkan lagi, serta memberitakan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap dua peristiwa itu.		FRAME SALIANSI : Menonjolkan langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah terkait kasus yang menimpa Sumiati dan Kikim Komalasari (sebanyak 4 paragraf), dengan tetap memberitakan bentuk kekerasan yang dialami kedua TKW tersebut.	
MEDIA FRAME <i>KR</i> cenderung membingkai peristiwa ini sebagai peristiwa yang tidak berperikemanusiaan sehingga mendapat reaksi dari pemerintah Indonesia berupa diambilnya sejumlah kebijakan untuk menangani permasalahan TKI tersebut.			

A. Informasi umum			
Nama Media	SKH Kedaulatan Rakyat		
Hari/ Tanggal	25 Nopember 2010		
Halaman	8		
Judul	PENYALURAN TKI JADI BISNIS MAFIA Moratorium Bisa Picu Penyelundupan		
Jumlah Alinea	7		
Penulis Berita	(Ati/Edi)-a		
B. Jenis Berita		Berita Langsung	
C. Analisis Teks			
ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Obyek wacana</p> <p>Pemerintah khawatir wacana moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kalau tidak dipersiapkan dengan baik bisa memicu penyelundupan TKI. (Par. 1/ <i>lead</i>)</p> <p>Pelibat wacana</p> <p>1. Pemerintah Pusat</p> <p>Pemerintah pusat merupakan</p>	<p>Jenis wacana</p> <p>a. Wacana moratorium akan memicu penyelundupan TKI.</p> <p>1. Judul : Penyaluran TKI Jadi Bisnis Mafia</p> <p>Moratorium Bisa Picu Penyelundupan</p> <p>2. <i>Lead</i> : Pemerintah mengkhawatirkan wacana moratorium atau penghentian</p>	<p>Placement</p> <p>Artikel ini membahas mengenai sikap pemerintah terhadap wacana moratorium (judul, <i>lead</i>, dan paragraf 2), menjelaskan hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyikapi sejumlah penyiksaan yang dialami TKI di luar negeri (par. 3), serta menampilkan usulan Komisi I</p>	<p>Depiction</p> <p>...moratorium tersebut bisa membuka ruang bagi pengiriman TKI secara ilegal...</p> <p>Kalimat di atas menunjukkan bahwa moratorium bisa memberi jalan atau menyediakan sarana terjadinya penyelundupan.</p>

<p>pihak yang berwenang mempertimbangkan dilakukannya moratorium TKI ke luar negeri atau tidak, serta melakukan kajian terhadap dampak dari moratorium tersebut.</p> <p>2. DPR RI</p> <p>DPR RI merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewajiban memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah terkait penuntasan masalah TKI.</p> <p>Pelantun wacana</p> <p>a. Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Agung Laksono merupakan bagian dari pemerintah menyatakan kekhawatiran</p>	<p>sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bisa memicu penyelundupan TKI. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, moratorium tersebut bisa membuka ruang bagi pengiriman TKI secara ilegal.</p> <p>3. Par. 2 : “Kita harus berhati-hati dalam mempersiapkan wacana moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Bisa saja ada oknum yang mengirimkan TKI dengan jalur ilegal disebabkan adanya aturan penghentian sementara dari pemerintah. Hal itu akan lebih membahayakan nasib TKI bersangkutan karena pengirimannya tidak diketahui</p>	<p>DPR RI terhadap pemerintah terkait penuntasan masalah TKI (par. 4-7).</p>	<p>“Diharapkan Pansus ini mampu membersihkan jaringan pengiriman TKI...”</p> <p>Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pansus, panitia khusus yang terdiri dari beberapa orang, sangat baik untuk dibentuk dalam rangka mempelajari, serta mengkaji permasalahan TKI khususnya jaringan pengiriman TKI hingga tuntas (tidak ada lagi), dan dari kajian-kajiannya itu Pansus nanti diwajibkan memberi laporan kepada pemerintah/ lembaga yang membentuknya (DPR RI).</p> <p>Catchphrases</p> <p>Kata “moratorium” berarti</p>
---	--	--	--

<p>pemerintah atas wacana moratorium TKI keluar negeri yang bisa menimbulkan penyelundupan jika tidak dikaji dengan baik.</p> <p>b. Mahfuds Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI</p> <p>Pelantun merupakan pihak yang mewakili Komisi Luar Negeri RI menyampaikan usulan kepada pemerintah mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan mafia penyaluran TKI serta menyelidiki kelemahan pemerintah dalam hal mekanisme penyaluran TKI ke luar negeri.</p>	<p>pemerintah.”</p> <p>Pernyataan di atas diungkapkan pelantun 1 Agung Laksono, (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) yang menjelaskan sikap pemerintah terhadap wacana moratorium TKI ke luar negeri. Bagi pemerintah wacana moratorium perlu dipersiapkan dengan baik untuk mencegah terjadinya pengiriman TKI secara ilegal.</p> <p>b. Solusi untuk menuntaskan permasalahan TKI.</p> <p>1. Par. 3 : ... hal terpenting yang perlu dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kasus penyiksaan yang dialami TKI di luar negeri adalah peningkatan</p>		<p>penundaan atau penangguhan. Kata ini menjadi poin dalam artikel ini dikarenakan wacana ini menimbulkan kontroversi karena disatu sisi moratorium dikhawatirkan menimbulkan penyelundupan TKI, di sisi lain bermanfaat untuk mengkaji kembali prosedur pengiriman TKI ke luar negeri.</p>
---	--	--	---

	<p>pengawasan dan membenahan prosedur pengiriman tenaga kerja.</p> <p>“Panggil perusahaan jasa TKI, dan lakukan pengawasan secara berkelanjutan dengan ketat, setelah itu lakukan seleksi dengan baik sebelum mengirim TKI, pastikan ada sertifikat, ijazah asli, keterampilan dan kelengkapan lain yang dibutuhkan”</p> <p>Pernyataan di atas juga diungkapkan pelantun 1 Agung Laksono. Kalimat “hal terpenting yang perlu dilakukan” pada awal opini pelantun menjelaskan bahwa terdapat sejumlah langkah yang lebih penting untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyiiksaan</p>		
--	---	--	--

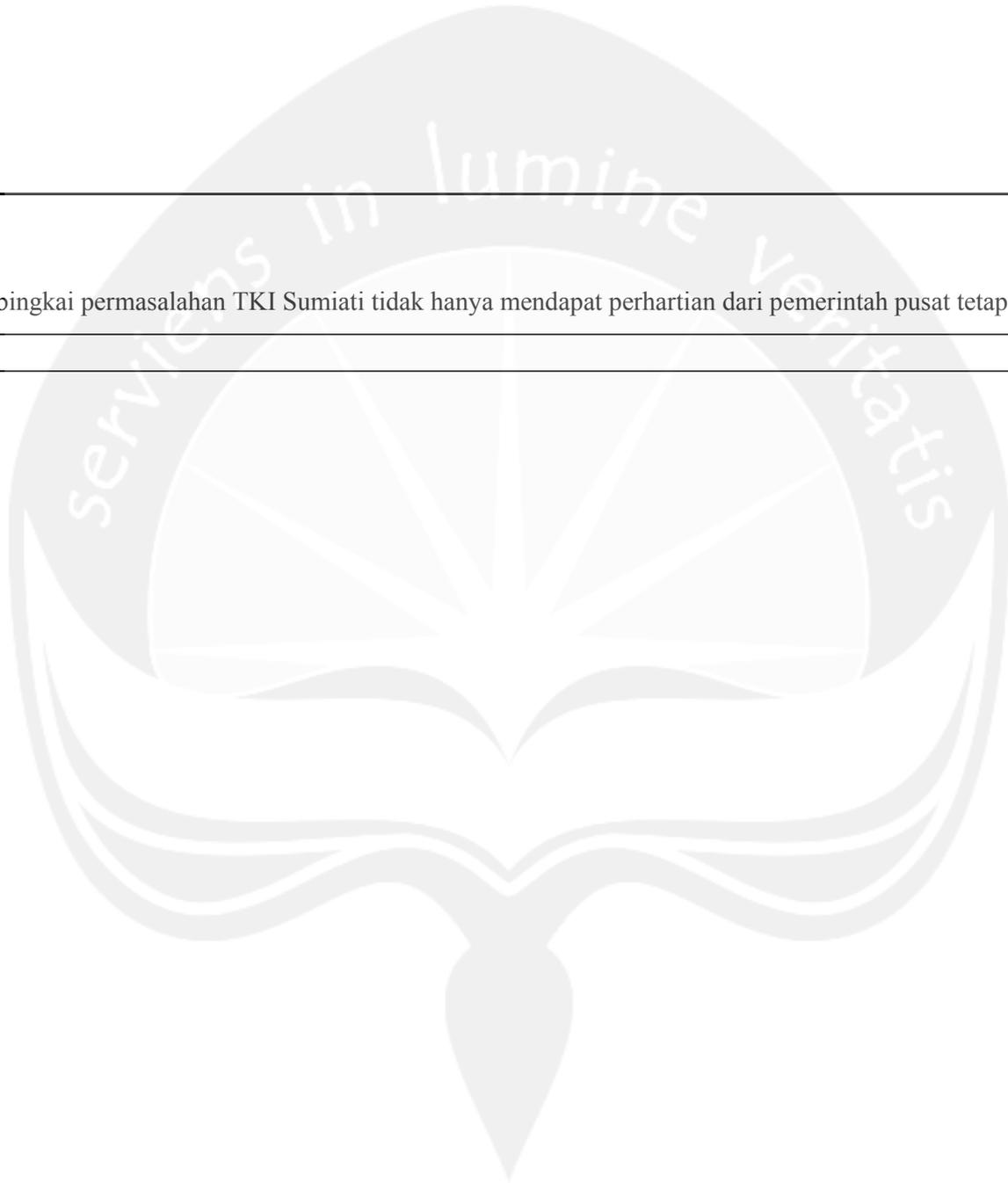
	<p>terhadap TKI daripada mempersoalkan wacana moratorium.</p> <p>2. Par. 4 : ...untuk menuntaskan masalah TKI, komisi luar negeri DPR RI... menyampaikan usulannya mengenai pentingnya dibentuk Panitia Khusus (PanSus)... Pansus dibutuhkan untuk mengurutkan dugaan kuat mengenai adanya mafia penyaluran TKI. Diharapkan Pansus ini mampu membersihkan jaringan pengiriman TKI.</p> <p>3. Par. 6 : ... dalam Pansus tersebut... akan dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kelemahan pemerintah dalam hal</p>		
--	---	--	--

	<p>mekanisme penyaluran TKI ke luar negeri.</p> <p>4. Par. 7 : Diharapkan... Pansus akan menemukan jawaban atas kelengahan pemerintah dalam hal perlindungan TKI ke luar negeri. Pansus nantinya akan memberikan masukan kepada pemerintah dan melakukan pembenahan mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri.</p> <p>5. Par. 8 : “Pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis PJTKI. Kedua, pemerintah juga jangan kemudian mengambil manfaat dari keberadaan TKI ketika Negara belum mampu menyediakan lapangan kerja...”</p> <p>Pernyataan-pernyataan di atas</p>		
--	--	--	--

	<p>diungkapkan pelantun 2 Mahfuds Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI. Pelantun menyatakan usulannya kepada pemerintah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) serta menjelaskan sejumlah tugas dari Pansus untuk membantu dan memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka menuntaskan masalah TKI.</p>		
<p>FRAME SELEKSI : Memberitakan sikap pemerintah terhadap wacana moratorium serta tanggapan anggota DPR RI terhadap permasalahan TKI dengan memberikan usulan untuk membentuk Pansus.</p>	<p>FRAME SALIANSI Wacana moratorium yang bisa menimbulkan penyelundupan TKI serta menonjolkan solusi penyelesaian masalah TKI.</p>		

MEDIA FRAME

KR cenderung membingkai permasalahan TKI Sumiati tidak hanya mendapat perhatian dari pemerintah pusat tetapi juga dari DPR RI.



A. Informasi umum			
Nama Media	SKH Kedaulatan Rakyat		
Hari/ Tanggal	29 Nopember 2010		
Halaman	8		
Judul	KOMNAS PEREMPUAN DESAK PENGHENTIAN Pengiriman TKI ke Timur Tengah Diperketat		
Jumlah Alinea	7		
Penulis Berita	(Ful)-f		
B. Jenis Berita		Berita Langsung	
C. Analisis Teks			
ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
Obyek wacana Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia terkait maraknya kasus penganiayaan TKI di luar negeri.	Jenis wacana a. Permintaan Komnas perempuan terhadap pemerintah untuk melakukan penghentian sementara TKI ke luar negeri sampai perjanjian kedua Negara benar-benar dipersiapkan.	Placement Artikel ini membahas tanggapan Komnas perempuan terhadap pemerintah terkait pengiriman TKI ke luar negeri (judul, <i>lead</i> , par. 2 – 4). Serta penjelasan dari Menakertrans mengenai tujuan diadakannya Rakor (par. 5-6).	Keywords Kata “desak penghentian” ini mengandung makna bahwa Komnas perempuan “meminta”, “menganjurkan dengan sangat” untuk mengakhiri atau menyudahi pengiriman TKI ke luar negeri. Kata “desak” berarti Komnas perempuan memaksa
Pelibat wacana 1. Komnas Perempuan Komnas perempuan merupakan	a. Judul : KOMNAS PEREMPUAN DESAK		

<p>suatu organisasi yang lahir untuk mewujudkan tanggung jawab Negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Berkaitan dengan kasus penyiksaan TKI di Arab Saudi, Komnas perempuan meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri.</p> <p>2. Pemerintah Pusat</p> <p>Pemerintah pusat merupakan pihak pengambil kebijakan atas kasus penyiksaan yang menimpa TKI di luar negeri.</p> <p>Pelantun wacana</p> <p>1. Neng Dara, Komisioner Komnas Perempuan merupakan pihak yang mendukung</p>	<p>PENGHENTIAN Pengiriman TKI ke Timur Tengah Diperketat</p> <p>b. <i>Lead</i> : Komnas Perempuan meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI... terkait maraknya kasus penganiayaan TKI di luar negeri...</p> <p>c. Par. 2 : “Hentikan sementara pengiriman TKI, sampai benar-benar disiapkan perjanjiannya”</p> <p>d. Par. 3 : ... Indonesia harus memiliki perjanjian yang tegas dengan Negara tujuan TKI... kedua belah pihak harus memiliki komitmen untuk memenuhi perjanjian bersama tersebut.</p>	<p>pemerintah untuk segera bertindak.</p> <p>Depiction</p> <p>“Kalau terjadi permasalahan TKI, tindakannya hanya responsif. Tidak antisipatif terhadap kekerasan yang akan terjadi selanjutnya”</p> <p>Kalimat penjabaran di atas menunjukkan bahwa penanganan masalah TKI selama ini belum <i>real</i>, pemerintah hanya cepat menanggapi namun tidak menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat jangka panjang.</p>
---	--	---

<p>dilakukannya penghentian sementara TKI ke luar negeri. Kepentingan pernyataannya adalah memberi masukan kepada pemerintah agar penghentian sementara dilakukan sampai Indonesia benar-benar memiliki perjanjian yang tegas dengan Negara tujuan TKI.</p> <p>2. Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan TKI. Kepentingan pernyataannya adalah menjelaskan langkah yang telah diambil berkaitan dengan pembenahan pengiriman TKI ke luar negeri.</p>	<p>Pemerintah harus memperbaiki kebijakan, artinya kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus benar-benar tegas dan konsisten.</p> <p>e. Par. 4 : “Kalau terjadi permasalahan terhadap TKI, tindakannya hanya responsif. Tidak antisipatif terhadap kekerasan yang akan terjadi selanjutnya”</p> <p>Pernyataan di atas disampaikan oleh pelantun satu (Neng Dara) yang menunjukkan pihaknya, dalam hal ini Komnas perempuan, menginginkan ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan TKI.</p> <p>b. Penjelasan pendapat dari Menakertrans mengenai tujuan</p>		
--	--	--	--

	<p>diadakannya rapat koordinasi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Par. 6 : “Karena itu dalam rapat koordinasi membahas penyempurnaan sistem, kita juga akan melakukan pengetatan terhadap pengiriman TKI ke Timur Tengah”2. Par. 7 : “Saya juga meminta ke semua pihak yang terlibat untuk ikut meningkatkan upaya perlindungan”... berharap dari rakor ini terjadi sinergi, ketaatan pada sistem dan juga peran lebih aktif terhadap perlindungan TKI. <p>Pada pernyataan di atas pelantun memberikan pandangannya atas rakor yang telah diadakan disertai harapan pelantun dari</p>		
--	--	--	--

	telaksananya rakor tersebut terhadap perlindungan TKI.		
FRAME SELEKSI : Komnas Perempuan meminta pemerintah untuk melakukan penghentian sementara pengiriman TKI ke luar negeri. Menakertrans menjelaskan tujuan dari Rakor.		FRAME SALIANSI Sikap Komnas perempuan terhadap pemerintah terkait penanganan masalah TKI	
MEDIA FRAME KR cenderung membingkai Komnas perempuan mendukung diadakannya penghentian sementara TKI ke luar negeri.			

Interview Guide

A. Pertanyaan Umum

1. Biodata narasumber yang diwawancarai (nama, jabatan di KR, latar belakang pendidikan)?
2. Sejarah dan Data SKH KR (Visi dan Misi)?
3. Rutinitas organisasi KR, mulai dari pra peliputan, peliputan, dan pasca peliputan (proses produksi berita di KR)?
4. Bagaimana sistem seleksi berita di KR?
5. Bagaimana sistem distribusi SKH KR?
6. Bagaimana sistem rapat redaksi dan kebijakan redaksi di KR?
7. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan rubrik?
8. Pandangan SKH KR sebagai media massa tentang kekerasan terhadap BMP atau isu-isu seputar BMP?
9. Menurut SKH KR, berita tentang BMP masuk ke dalam bidang apa atau termasuk kasus yang multidimensi?
10. Bagaimana penentuan sebuah berita masuk ke rubrik atau halaman apa?

B. Pertanyaan untuk Redaksi

1. Apa tugas Pemimpin Redaksi (Pemred) sejauh ini?
2. Sejauh apa kontrol Pemred dalam produksi berita?
3. Apakah rapat redaksi rutin dilaksanakan? Apa saja yang dibahas dalam rapat redaksi?
4. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan suatu peristiwa atau wacana layak diberitakan atau diliput?
5. Apakah ada aturan yang dibuat oleh redaktur bagi para wartawan untuk mencari berita dan narasumber berita?
6. Apakah faktor ruang (*space*) yang tersedia dalam Koran mempengaruhi isi berita?
7. Apakah wartawan sering dilibatkan dalam penempatan berita?

8. Dalam pengemasan berita, ada tidak ketentuan dari KR sendiri untuk pemilihan kata atau penggunaan atribut tertentu? Dalam berita-berita kekerasan, misalnya penggunaan kata “tewas”?
9. Bagaimana cara penentuan judul dan sub judul dalam SKH KR?
10. Apakah ada maksud-maksud tertentu dalam setiap judul dan sub judul yang digunakan oleh SKH KR dalam pemberitaannya?
11. Bagaimana penentuan *lead* dan paragraf penutup dalam pemberitaan di SKH KR?
12. Bagaimana penugasan wartawan dalam meliput berita?
13. Di KR banyak redaktur, apakah berita tetap harus diedit oleh redaktur pelaksana?
14. Berita seperti apa yang dapat menjadi berita utama (*headline news*)?
15. Bagaimana menentukan aspek mana yang akan ditonjolkan atas suatu peristiwa dan aspek mana yang dihilangkan?
16. Soal media berperspektif gender, bagaimana pendapat anda?
17. Terkait masalah-masalah BMP, bagaimana pandangan anda secara pribadi?
18. Bagaimana pandangan KR terhadap realitas kekerasan terhadap BMP?
19. Apakah ada kebijakan redaksi yang khusus untuk membahas atau meliput isu-isu seputar BMP tersebut?
20. Apakah pihak redaksi menyediakan space khusus untuk menyajikan berita soal BMP? Ataukah terdapat kebijakan bahwa semua berita seputar BMP ditempatkan di halaman tertentu? Apa yang menjadi ukuran penempatan itu?
21. Apakah KR sudah memiliki frame seputar masalah BMP, khususnya kasus kekerasan terhadap BMP? Frame apakah yang cenderung diangkat KR dalam memberitakan seputar permasalahan BMP?
22. Apakah wartawan yang meliput mengenai permasalahan ini ditunjuk langsung oleh redaktur atau ada aturan lain?
23. Untuk peristiwa-peristiwa yang sifatnya nasional seperti dalam kasus ini, apakah KR memiliki *frame* tersendiri dalam pemberitaan? *Frame* seperti apa?
24. Sebagai Koran lokal, bagaimana dengan narasumber di luar Yogyakarta, dalam kasus ini misalnya narasumber yang ada di Jakarta?

25. Apakah ada perbedaan pandangan atau frame berita antara redaktur dengan wartawan? Untuk kasus BMP, pernahkah ada perbedaan? Bagaimana cara mengatasi perbedaan pandangan tersebut?
26. Berkaitan dengan masalah ini, apa pertimbangan pemilihan narasumber?
27. Apakah sebelum dan selama wawancara dengan narasumber, wartawan sudah memiliki arah/ frame berita? Frame seperti apakah yang menjadi pegangan?
28. Untuk peristiwa seperti ini, apakah ada *dateline* atau batasan waktu untuk mengirim berita?
29. Bagaimana cara menentukan *lead* dan judul pada setiap berita yang membahas soal kekerasan terhadap BMP atau isu-isu seputar BMP?

C. Pertanyaan untuk Wartawan

1. Bagaimana alur produksi berita di KR?
2. Ketika meliput berita, pedoman apakah yang digunakan?
3. Ada tidak kontrol dari pihak luar terhadap pemberitaan KR?
4. Apakah ada kebijakan redaksional di SKH KR dalam pemberitaan?
5. Bagaimana implementasi kebijakan redaksional SKH KR dalam memberitakan peristiwa seputar BMP, khususnya terkait dengan peristiwa kekerasan terhadap BMP?
6. Adakah kecenderungan keberpihakan dalam pemberitaan yang dibuat wartawan berdasarkan kebijakan redaksional SKH KR? Jika ada, mengarah ke mana dan mengapa? Untuk kasus ini bagaimana?
7. Pada tingkatan ideal institusi pers, ada yang menghendaki kenetralan dan ada yang menghendaki keberpihakan, bagaimana menurut anda? Untuk kasus BMP, bagaimana sikap anda?
8. Apakah judul dan sub judul dalam berita dibuat oleh wartawan atau redaksi?
9. Jika wartawan yang membuatnya, apa maksud dari judul dan sub judul yang ditulis untuk tiap-tiap berita?
10. Bagaimana penentuan urutan narasumber yang ditulis dalam teks berita?
11. Apakah ada aturan yang dibuat mengenai panjang berita yang dapat dan harus diikuti?

12. Bagaimana penentuan isi, *lead*, dan paragraf penutup dalam berita?
13. Isi berita sendiri, ada tulisan dari beberapa wartawan, bagaimana penulisannya?
14. Siapakah yang menentukan berita dapat di muat dan bagaimana sistemnya?
15. Terkait peristiwa BMP, sejauh mana anda mengetahui permasalahan ini? Bagaimana pandangan anda? Pihak yang bertanggung jawab?
16. Bagaimana anda menggambarkan sosok BMP?
17. Apakah ada pertimbangan tertentu ketika mengangkat/ memberitakan masalah ini?
18. Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman tertentu?

D. Pertanyaan Terkait Artikel yang diteliti

1. Mengapa KR cenderung menitikberatkan pemberitaan pada tindakan pemerintah? Apakah peristiwa ini hanya menjadi urusan pemerintah dan menyiratkan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap permasalahan Buruh Migran Indonesia (BMI)?
2. Jika memang benar demikian, lalu apa yang melatarbelakangi KR memilih *frame* yang seperti itu? Hal apa saja yang kiranya mempengaruhi pandangan KR terhadap permasalahan BMI, khususnya BMP?
3. Apakah narasumber yang dipilih KR berkaitan peristiwa ini hanya terbatas pada aktor politik dan aparat pemerintah (DPR RI, MPR RI, Presiden, para Menteri terkait, Dubes Arab Saudi, Dubes Indonesia, dan Komnas perempuan)? Mengapa demikian?
4. Bagaimana opini DPR RI, MPR RI, Presiden, para Menteri terkait, Dubes Arab Saudi, Dubes Indonesia, dan Komnas perempuan diposisikan dalam berita-berita terkait peristiwa kekerasan terhadap BMP ini?
5. Mengapa KR tidak menyajikan narasumber dari kaum intelektual, LSM, pemerhati perempuan (seperti Yayasan Jurnal Perempuan), untuk memberikan komentar maupun solusi terkait masalah BMP ini?

6. Apakah narasumber yang dipilih merupakan wewenang wartawan atau ada penugasan khusus dari redaksi untuk mengarahkan narasumber-narasumber yang dituju?
7. Bagaimana sebenarnya pandangan KR terhadap peristiwa kekerasan terhadap BMP? Apakah sekedar memberitakan atau ada pertimbangan/ tujuan lain?
8. Apakah prinsip mengutamakan kepentingan publik menjadi patokan untuk memuat suatu berita, termasuk peristiwa ini?
9. Menurut KR, tindakan pemerintah sejauh ini sudah tepat atau belum? Khususnya terkait wacana pemberian HP oleh Presiden dan pembentukan Pansus oleh DPR RI?
10. Menurut anda, sebaiknya langkah apa yang ditempuh untuk penyelesaian masalah BMP?
11. Soal pendidikan untuk para BMP, bagaimana pendapat anda?
12. Bagaimana pendapat anda tentang wacana moratorium?
13. Dalam beberapa berita terdapat judul dan sub judul, bagaimana kebijakan dalam menentukan judul dan sub judul tersebut?
14. Mengapa berita-berita terkait kasus kekerasan terhadap BMP ini ditulis oleh banyak wartawan (gabungan tulisan)?
15. Dalam beberapa berita, judul kadang tidak berkaitan dengan *lead*, tetapi malah merupakan bahasan pada tubuh berita, mengapa demikian?
16. Mengapa kadang menyebut TKI, kadang menyebut TKW dalam pemberitaan ini? Apakah ada aturan khusus mengenai penyebutan ini, atau tergantung dari wartawan yang menulis berita?
17. Mengapa korban digambarkan demikian dalam pemberitaan (bentuk dan akibat kekerasan)?
18. Mengapa menggunakan kalimat seperti “kerap disiksa”, “penganiaya TKI”, “majikan Sumiati”, “dibunuh majikan”, tanpa menyebutkan nama pelaku? Apakah hal ini untuk menyamakan tersangka atau ada pertimbangan lain?
19. Apakah ada kaitannya dengan kebijakan redaksi berkaitan dengan penulisan berita kekerasan?

20. Sejauh ini media lebih banyak memberitakan kasus kekerasan terhadap BMP daripada terhadap laki-laki, bagaimana pandangan KR?
21. KR memilih memberitakan yang mana, kekerasan terhadap BMP atau prestasi BMP di Negara tujuan migrasi? Mengapa demikian?
22. Kemana arah pemberitaan masalah BMP ini? Bagaimana posisi KR?



**A. Transkrip Wawancara dengan Redaktur Pelaksana KR Hudono
(Senin, 25 April 2011 di Kantor Redaksi KR)**

Biodata singkat:

Nama : Drs. Hudono, SH
Alamat : Jl Soga 77 Umbulharjo Yogya
Pendidikan : Lulusan FH UGM 1996, IKIP YOGYA (UNY) 1992
Pekerjaan : Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Jabatan : Redaktur Pelaksana
Organisasi : Wakil Ketua PWI Yogya, Bidang Pembelaan Wartawan

1. Peneliti (P) : Bagaimana proses produksi berita di KR?

Hudono (H) : secara garis besar, *eh* dalam proses peliputan semuanya ada perencanaan *ya* kecuali kasus atau peristiwa yang sifatnya spontan, *eh* atau momentum *ya*, yang terjadi secara tiba-tiba misalnya seperti itu. Itu *eh* kita ada mekanisme untuk *budgeting* berita, ada mekanisme untuk *eh* alokasi penempatan sebuah berita, apakah berita itu harus ditempatkan di halaman depan, apakah dijadikan *headline*, apakah hanya ditampilkan dibelakang dan sebagainya, itu akan, tentu akan melalui mekanisme yang saya sebutkan tadi, ada rapat yang namanya rapat redaksi, *eh* mekanisme ini sudah berlangsung lama dan meliputi berita apa saja, bahkan kejadian bom yang kita tidak pernah tahu itupun, kita bisa *mee..* apa, *membudget ya* kira-kira *ni* kuat *ga* untuk dijadikan kejadian seperti itu, karena memang ada cukup waktu bagi jajaran redaksi untuk mempertimbangkan *eh* pertimbangannya ada tidaknya, layak tidaknya sebuah berita dijadikan *headline*, begitu. *Eh* saya pikir kalau secara umum itu, secara umum jadi tidak kemudian asal-asalan memasang sebuah berita, tidak seperti itu. Tapi ada mekanisme yang harus kita *pertimbangin* secara matang *kan* sudah dilakukan berulang kali, sampai sekarang *eh* tidak berubah mekanismenya, sekian.

2. P : Jadi kalau seumpamanya untuk berita-berita nasional apakah mekanisme itu juga berlaku?

H : *Ya*, itu diberlakukan untuk berita-berita nasional bahkan berita nasional yang *eh* kalau kita lihat di KR itu lebih banyak menempati posisi halaman satu dan halaman delapan, artinya halaman di luar itu, itu memang kita *eh* ekstra lebih apa, lebih jeli, lebih hati-hati karena halaman muka itu kita ibaratkan sebuah etalase, jadi orang akan melihat pertama itu dimuka *ya*, kalau mukanya jelek, *kan* orang tidak akan tertarik *kan* gitu, *ya* sama.

3. P : *hmm*, berarti ada kebijakan redaksi tertentu untuk menentukan bahwa berita-berita nasional itu harus di halaman muka. Seperti itu *ya* pak?

H : Oh *ya*, tentu saja *iya*. *Cuman*, tidak dikhususkan oleh satu orang *ya*, kita ada tim *ya*, tim yang *eh* melakukan diskusi untuk memilih kelayakan suatu berita, tentu pertimbangannya secara konvensional kita melihatnya, *eh* nilai berita *ya*, *eh* setelah itu kemudian kita lihat kelayakannya.

4. P : *Iya* pak dilanjut, untuk *eh* sistem seleksi berita di KR sendiri itu seperti apa *ya* Pak. Apa yang menjadi pertimbangan suatu berita itu layak diberitakan ?

H: *Ya*, saya pikir *eh* begini, dalam prakteknya semua berita yang masuk *ya* kita harus tahu *ya*, semuanya, berapa pun jumlah berita yang masuk kita tahu, *eh* kemudian penyaringan awal itu tentu ada pada reporternya sendiri *ya*, karena dia yang langsung berhubungan dengan fakta, kemudian setelah itu, *eh* berita itu *kan* masuk ke *desk* redaktur, redaktur itu juga punya kewenangan untuk menilai apakah suatu berita itu layak tidak, apakah cukup berbobot atau tidak, dan sebagainya. Setelah itu ada redaktur pelaksana *ya*, yang *eh* punya kewenangan pula untuk menilai kelayakan suatu berita. Dan pemilihan-pemilihan berita itu kalau untuk halaman luar terutama *ya* halaman luar, itu kita lebih apa *ya*, sifatnya lebih kolektif, walaupun tidak *dateline*, sebenarnya kolektif. Namun, *eh* karena sudah terbiasa rekan-rekan itu berpikir secara analitis misalnya, itu kita mempercayakan kepada dia. Tapi, apa pun yang kemudian diputuskan nanti bisa dianulir ketika sudah menjadi *print out* misalnya. *Eh*, redaktur pelaksana bisa mengganti sebuah berita *ya*, kadang memang ada isu *kecil-kecil* itu yang

kemudian kita memperhitungkan, *oh* ini kayaknya tidak layak, sudahlah, *cancel* aja, atau, ini datanya kok kayaknya masih *setungir*, *eh* cobalah kita *cancel* dulu, trus kita *eh* lengkapi. Di halaman luar tentu saja lebih selektif *ya*, karena itu melibatkan pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, *eh* dan redaktur di halaman nasional, *eh* saya mengatakan istilah wartawan nasional itu, *eh* apa, *eh* halaman nasional itu halaman depan bukan halaman belakang *ya*. Itu ekstra lebih cermat, lebih hati-hati. Bukan berarti yang lain tidak cermat. Begitu *ya*, sepertinya seperti itu. *Eh*, *ya* mulai itu kita seleksi, kita beri *ranking*. Ini yang paling berbobot *rankingnya* nomer satu *kan*, satu, kemudian yang *eh* bawahnya *ya* *ranking* dua, tiga, dan seterusnya. Yang paling berbobot tentu akan kita letakkan sebagai *headline* dan yang selanjutnya kita letakkan dibawahnya. Sebenarnya seperti ini *ya*, (menunjuk salah satu berita), bahwa kasus NII itu luar biasa, dampaknya luar biasa, sehingga kita memilihnya sebagai *headline*, kemudian bom dan sebagainya. Ini masih peringkat dibawahnya. *Eh ya* itu cara-cara kami menyeleksi. Sekarang apa ukurannya, apa standarnya. Tentu *eh* pada nilai berita. Nilai berita mungkin anda ingat *ya*, *significan ya*, *magnitude*, dan sebagainya. Kemudian mungkin ada tambahan yang beberapa pakar komunikasi mengatakan ada konflik *ya*, pelecehan seksual *ya*, dan sebagainya. Itu *kan* ada beberapa tambahan. Itu, itu kita pahami benar *ya*, kita pahami benar. Kemudian, *eh* yang kita tekankan dari semuanya itu sebenarnya mengenai kepentingan publik. Ada *gak sih* kepentingan publik disitu. Kalau memang kepentingan publik sangat kuat, tentu bobotnya jauh lebih tinggi, *kan* seperti itu. *Eh*, setelah itu semuanya barulah kita menilainya, *eh* layak tidak suatu berita, mungkin dia memenuhi syarat, apa, nilai berita, *ya* nilai berita namun tidak layak, tidak *to print*, misalnya *ya* begitu *ya*. *Ya* itu bisa di *cancel*. Apa koridornya. Apa rambu-rambunya. SARA *ya*, SARA. Kemudian kecenderungan pencemaran nama baik, misalnya seperti itu. Kemudian pelanggaran etika. Itu yang membuat suatu berita layak atau tidak. Pertimbangannya antara lain itu tadi. Saya pikir itu secara garis besarnya.

5. P : Berarti disini *eh* kepentingan publik misalnya target pembaca itu sendiri *ya pak*, berarti berpengaruh dalam penentuan suatu berita itu layak atau tidak?

H : iya, tentu iya. Tentu iya, karena apalagi publik itu *ya*, KR itu Koran lokal *ya*. Koran lokal yang bisa berdampak nasional *kan gitu*. Jadi, kita harus mengatakan KR bukan Koran nasional. Koran lokal yang hidup di budaya pinggiran *gitu*, tentu akan berbeda dengan Koran lokal di Jawa Timur. *Nah*, publik disini tentu lebih kita *eh* tekankan pada publik di DIY. *Ya* mereka yang membaca, mereka yang membeli Koran *ya* tentu kita, kita sangat-sangat hormati, kita sangat-sangat hormati. Jangan sampai kemudian *eh* mengecewakan mereka *ya*. Jangan sampai kemudian membodohi mereka dan sebagainya. Saya pikir itu, *eh* rasionya seperti itu.

6. P : *Eh kan* untuk berita-berita nasional sendiri *kan* kalau kita tahu bersama itu juga diberitakan oleh harian nasional. *Eh*, apakah KR punya *angle* tertentu yang diambil untuk membedakan antara berita KR dengan berita-berita nasional?

H : *ya* saya pikir iya. *Eh* bahwa publik lokal *ya*, publik lokal juga butuh berita nasional. Itu itu harus kita tempatkan dulu itu sebagai bahan diskusi. Jogja, masyarakat Jogja, pembaca KR itu juga butuh informasi yang bersifat nasional, bahkan internasional *kan* seperti itu. Bahkan internasional. Bagaimana KR bisa mengakomodasi *eh* kebutuhan mereka, *kan* begitu. Kalau kemudian, *eh* Koran nasional *kan* sudah banyak bertebaran dimana-mana, bukankah itu kemudian sudah cukuplah bagi Koran nasional untuk mencukupi kebutuhan pembaca di lokal DIY. Saya pikir tidak demikian *eh* pola pikirnya. Tapi, KR akan mencari *angle* yang menurut KR sendiri itu sangat-sangat menarik dan *eh* lebih apa, *eh* lebih gampang dipahami, lebih *eh* enak dipahami oleh pembaca KR sendiri. Jadi kita ambil *angle-angle* yang mungkin tidak dipakai oleh media nasional. *Ya*, misalnya soal *ya kan* ini dalam konteks apa TKI *ya*, TKI *ya*, *ya* kita cari *angle* yang betul-betul berbeda dengan Koran nasional. Misalnya TKI yang ada diwilayah DIY *kan* gitu. Ini *kan* lebih ke *eh* apa, *proximity ya*. Padahal kalau yang

nasional mungkin tidak mengangkat DIY, lokal DIY, Jateng *nggak*. Tapi secara menyeluruh, mungkin seperti itu. Tidak spesifik ke apa lokal. Kita ambil *angle* itu tentu, *ya*. Itu yang membedakan antara Koran daerah yang mengapit masalah dengan Koran nasional yang mengangkat isu nasional *kan* gitu saya pikir.

7. P : Kembali ke proses peliputan berita itu sendiri pak. Apakah ada aturan tertentu yang dibuat oleh redaktur bagi para wartawan untuk mencari berita atau narasumber berita?

H : Kalau aturan tertentu saya pikir *nggak ya*. Kita *nggak* memiliki aturan tertentu. Tapi aturan yang sudah tentu *ya*, sudah apa, secara umum ada. Misalnya hal-hal yang sifatnya teknis, teknis peliputan berita yang *eh* secara umum harus dipahami oleh, *eh* para reporter. Tidak bisa kemudian reporter begitu menyampaikan berita dia pulang dan setelah itu ... misalnya seperti itu. Tentu akan ada mekanisme untuk menegur *ya*, karena *eh* setiap reporter diminta tanggung jawabnya untuk *eh* apa *ya* *eh* bahwa liputannya itu betul-betul akurat *kan* gitu. Tidak bisa kemudian dia *asal-asalan* dengan data yang apa adanya, sampaikan kepada redaktur bahwa ada persoalan. Tidak bisa seperti itu. Tapi, dia harus tanggung jawab atas berita yang ditulisnya. Meskipun secara hukum *ya*, secara hukum nanti tanggung jawab itu ada pada pemimpin redaksi. Tapi kita menanamkan rasa tanggung jawab sebagai seorang jurnalis. Bagaimana dia betul-betul *eh* bisa mempertanggung jawabkan tulisannya *ya*. Termasuk kalau ada komplain dan sebagainya. Dia harus menyadari konsekuensi apa yang dia tulis, *kan* itu. Itu kita tanamkan, kita tanamkan dan saya *nggak ngerti* apakah ini dilakukan oleh media selain KR, *nggak ngerti ya* saya karena ini anda penelitian di KR, itulah yang terjadi. *Eh*, saya pikir itu.

8. P : Untuk pemilihan narasumber sendiri pak, bagaimana? Apakah untuk kasus tertentu ditentukan oleh redaksi untuk narasumber yang harus diwawancarai seperti ini atau bagaimana?

H : *Ya*, pertama kita akan memberi keleluasaan kepada reporter untuk menentukan *ya* narasumbernya. Kita juga bisa tanda kutip *mengetes ya*, *mengetes* reporter

sejauh mana wawasan dia tentang materi yang ditulisnya. Kalau dia bicara TKI, siapa narasumber yang paling kompeten, *kan* seperti itu. Ini sebenarnya, *eh* ada penilaian dari para redaktur *ya* untuk apa, untuk mengetahui kapasitas reporternya. Kalau *you* menulis soal *eh* pemerjaraan TKI di luar negeri, lantas apa siapa narasumber yang paling kompeten. Setelah *eh* dia mungkin kesulitan, *okelah*, redaktur baru membantu, membimbing. Saya pikir proses itu terus, terus berlangsung. Tapi, yang pertama kali adalah memberi keleluasaan kepada reporternya dahulu. Kalau dia sudah kelabakan, sudah kebingungan dan sebagainya, barulah redaktur memberikan apa *ya*, semacam bimbingan *ya*, semacam bimbingan atau bantuanlah. Saya pikir itu, *ya*. Jadi, bukan semuanya ditentukan oleh redaktur *ya*. Memang kalau untuk kasus-kasus tertentu yang, yang sangat-sangat besar, luar biasa, *ya* redaktur terkadang sudah menentukan narasumbernya. *You* tolong hubungi A, B, C, D, dan sebagainya. Karena kita butuh yang cepat, *kan* gitu. Saya pikir itu.

9. P : Untuk penentuan rubrik sendiri pak atau penempatan suatu berita di halaman tertentu itu, kebijakan dari redaksi itu seperti apa?

H : Kalau *eh* di KR, anda amati memang ada halaman-halaman yang sudah, sudah pasti *ya*. Setiap hari senin seperti ini, Selasa, dan seterusnya. Hanya saja penempatannya yang lebih, *eh* ini, yang lebih mencolok sebenarnya, apakah itu berita sangat penting, cukup penting *ya*, kurang penting, dan sebagainya misalnya *ya*. Itu *kan* akan menentukan *eh* berita akan diletakkan dimana *kan*. Apakah itu di halaman satu, di halaman muka ataukah di halaman dalam. Semakin penting memang di halaman dalam *kan* logikanya, semakin tidak penting *ya* di halaman... *Eh sorry, sorry*, di halaman luar *ya*, di halaman nasional. Semakin tidak penting di halaman dalam, itu prinsipnya. TKI kalau itu tidak terlalu penting, misalnya TKI yang menikah di luar negeri dan tidak ada, apa, *eh news valuenya ya, ya* sudah dalam saja. Tapi kalau TKI yang dianiaya oleh majikan tidak ada perhatian dari pemerintah Indonesia, itu sangat-sangat layak untuk ditempatkan di halaman depan. Contoh konkritnya seperti itu.

10. P : Terkait masalah-masalah TKI ini sendiri pak, sebenarnya apakah ada kebijakan redaksi khusus untuk membahas isu-isu seputar TKI ini?

H: *Ya, eh*, soal TKI kita harus, *ya eh* sebenarnya kita tidak ada semacam apa *ya*, peringatan mungkin *ya* dari pemerintah bahwa media harus bagaimana sebenarnya *nggak ya*. Tapi, ketika menteri Tenaga Kerja datang ke KR *ya*, datang ke KR kita sangat-sangat kritis. Bahwa pak menteri *eh* banyak sudah kritikan kepada bapak soal perhatian pemerintah terhadap nasib TKI di luar negeri bahkan ada sebagian yang menginginkan bapak untuk mundur, *nah* seperti itu. Itu sebenarnya *kan eh* apa, satu pertanyaan *ya* yang sangat menggelitik, yang sangat kritis agar ada pembenahan terhadap nasib, nasib TKI. Kita *nggak* ada beban apa pun. Tapi, yang jelas komitmen kita adalah bagaimana warga Negara Indonesia di luar negeri, apakah itu TKI atau bukan itu benar-benar bisa memperoleh haknya. Hak dia sebagai warga Negara Indonesia, bahwa hak warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri ada hak untuk dilindungi, *eh* untuk tidak mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan, penganiayaan, dan sebagainya. Utamanya TKI, karena yang paling rentan *ya*, menerima perlakuan tidak manusiawi dari *eh* pengguna jasa. Itu saya pikir. Jadi, komitmen kita sudah sangat-sangat jelas. *Frame* kita bahwa TKI dimana pun dia berada harus mendapat perlindungan hukum yang memadai, itu *frame* kita. Jadi di tanah air pun demikian. Jadi tidak hanya di luar negeri. Kalau di tanah air saja sudah dibiarkan dan sebagainya, kemudian pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, apalagi diluar negeri. Itu logika yang sangat-sangat, apa *ya*, kita-kita perhatikan itu.

11. P : Dalam kasus ini *kan* seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan itu terjadi pada, *eh* khususnya yang perempuan, TKW, seperti itu. *Eh* sebenarnya KR sendiri memandang realitas kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa?

H : *eh*, kalau, iya, kekerasan itu *kan* memang fenomena *ya*, fenomena yang mau tak mau *eh* kita mengakui *ya*, mengakui memang ada, bahkan dimana-mana terjadi kekerasan terhadap perempuan. Mengapa kok perempuan? Karena yang paling rentan, yang paling mudah barangkali *ya*, kalau saya ingin pakai bahasa

yang agak, agak ... itu paling rentan. Dalam beberapa kasus mayoritas perempuan *ya*, yang jadi korban kekerasan, termasuk di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu kalau konsep Indonesia *ya*, rumah tangga itu adalah suami, istri, yang satu adalah pembantu rumah tangga, *kan* gitu. Dan ada anak dan sebagainya. Itu konsep rumah tangga yang ada di *eh* undang-undang *eh* penghapusan kekerasan terhadap perempuan, undang-undang nomer 23 tahun 2004. *Eh*, bukan berarti tidak bisa sebaliknya. Bisa. *Eh*, perempuan menjadi pelaku *ya* dalam kekerasan terhadap suami misalnya. Itu terjadi. Di Sleman pernah *ya*, disidangkan kasusnya. Dan saat ini juga ada di Jawa Tengah *pa ya*, kalau *nggak* keliru, itu juga seperti itu. Atau *di...* nanti dicari. Perempuan menyakiti suami *kan gitu*. Namun itu sangat-sangat kasuistis. Umumnya, secara umum saya harus mengatakan bahwa perempuanlah yang paling banyak menjadi korban kekerasan terutama *ya* di dalam *eh* rumah tangga. Rumah tangga di luar negeri, berarti ada majikan, ada pengguna jasa, yang *eh* kemudian bertindak semena-mena *ya*, *eh* bahkan melebihi batas-batas kemanusiaan. Kita lihat beberapa kasus yang anda, anda beri tanda itu. Itu *kan* kasus-kasus yang memang, *eh* sudah umum terjadi. Sudah umum, sudah umum namun terus berulang. Dan sudah umum pula pemerintah akan memberikan *statement* yang cukup keras. Namun dari segi aksi tidak pernah kemudian efektif *kan*. Baru, baru-baru ini *aja* mungkin agak *digenjet* bagaimana perlindungan terhadap TKI di luar negeri supaya lebih efektif. Saya pikir itu.

12. P : Apakah eh peliputan masalah-masalah TKI ini apakah eh wartawan itu telah memiliki *frame* khusus yang sesuai dengan apa frame oleh redaksi. Eh, apakah ada perbedaan antara *frame* redaktur sama frame wartawan?

H : *Ya*, *eh* bahwa perbedaan *frame* saya pikir bisa terjadi *ya*, karena itu redaktur akan melihat tulisan, *eh* reporternya. Misalnya, *ya* ketika reporter itu lebih banyak berpihak pada majikan misalnya *ya*, itu sebenarnya kita tahu betul *ya*, ini ada yang perlu diluruskan. Apalagi duduk persolannya sudah sangat-sangat jelas. Karena itu, *eh* apa, teknik peliputan yang *cover both side* itu memang harus kita kedepankan. Kalau *eh* anda mendapatkan korban, korban, kemudian dia bercerita

banyak, akan lengkap kalau anda bisa konfirmasi dengan pelakunya. *Ya* pelakunya, dengan majikannya. Tapi ketika majikan itu sudah sangat sulit dihubungi, *ya* sudahlah. Itu yang penting wartawannya sudah berusaha untuk menghubungi namun mungkin tidak berhasil. Tapi, secara jurnalistik itu sudah memenuhi syarat untuk kemudian ditampilkan. *Eh*, mengapa ada keberpihakan *ya*, *eh ya* tentu saja karena merekalah yang paling rentan, TKI itu paling rentan. Kalau kemudian ada perbedaan *frame* antara reporter dengan redaktur, saya pikir bisa diselesaikan secara, secara diskusi semacam ini. Secara rileks dan kita beradu argumen. *Ya* beradu argumen. Tapi, dalam kenyataannya tidak pernah kemudian, *eh* kalau berdebat soal wacana *nggak* masalah *ya*, tapi kalau soal, soal *eh* implementasi terhadap aturan misalnya undang-undang, *nah* itu barulah mungkin baru ada perbedaan aturan undang-undang. Bagaimana *sih* undang-undang di Indonesia telah mengakomodasi kepentingan TKI di luar negeri misalnya. Itu, *eh ya* terkadang wartawannya kurang banyak memahami, karena mereka meliput *ya* cuma meliput begitu saja tanpa referensi yang, referensi yuridisnya, misalnya seperti itu. *Eh*, saya sering mengingatkan kepada teman-teman reporter, kalau anda mau meliput soal kekerasan *eh* TKI, tolong baca undang-undang tenaga kerja, tolong baca referensinya. Sehingga ketika dia meliput, dia sudah punya bekal yang cukup. Itulah proses yang perlu kita ingatkan. Saya pikir itu.

13. P : Untuk peliputan masalah-masalah TKI tersebut apakah ada kriteria khusus untuk pemilihan narasumber?

H : *Ya*, tentu saja *iyalah* ada kriteria pemilihan narasumber. Kalau ada TKI dianiaya, *ya* tentu pertama kali narasumbernya korban itu sendiri *ya*, kalau tidak bisa mendapatkan korban, mungkin keluarganya. Biar *cover both side*, maka pelakunya *ya*. Setelah itu cari pihak-pihak yang berkompeten. Narasumber siapa sesungguhnya yang punya *eh* kekuasaan untuk melindungi TKI itu. Kalau dia berada di luar negeri, maka paling tidak, setidaknya KBRI itu harus tahu. KBRI. Dia tidak bisa lepas tangan terhadap nasib TKI yang ada di wilayahnya. Karena KBRI ini *kan* sesungguhnya perwakilan negara di luar negeri. Dia harus bisa memantau. Sejauh mana anda memantau warga Indonesia yang ada di luar

negeri *ya*. Itu narasumber yang harus dihubungi. Dan di Indonesia juga seperti itu. Kita ada bidang yang paling bertanggung jawab atas *eh* nasib TKI. Siapa? Menterinya. Yang paling, paling kompeten itu menterinya. Kalau presidennya *kan* paling hanya menerima laporan. Yang penting menterinya. Bagaimana cara reporter betul-betul bisa mendapatkan wawancara dengan menteri. Itu narasumber yang memang harus-harus dihubungi. Saya pikir itu.

14. P : Kembali ke proses penyusunan berita itu sendiri, dalam penentuan lead, sub judul atau judul itu sendiri, apakah dari reporternya atau di bicarakan dalam rapat redaksi dan itu merupakan kebijakan redaksi?

H : *Ya*, kalau judul *ya*, sub judul dan sebagainya *eh* kita memberi keleluasaan penuh kepada reporter *ya*. Silahkan anda latihan bikin judul, begitu *ya*. Silahkan anda bikin sub judul dan sebagainya. Bahwa kemudian akan ada rapat redaksi untuk menentukan judul, *iya*. Kita akan memilih judul yang betul-betul memenuhi kriteria sebuah judul, *kan* gitu. Karena tidak semua reporter itu juga paham *ya* soal atau mengerti, mengerti *ya*. Mengerti soal, soal pemilihan judul. Itu pun akan dipengaruhi oleh kuota. Misalnya, kalau berita itu hanya tiga kolom maka tidak mungkin akan panjang judulnya. Begitu pula kalau dua kolom *nggak* mungkin judulnya akan panjang-panjang. Bagaimana membuat judul yang ringkas, padat, dan langsung mudah dipahami. Itu memang ada, ada apa *ya*, *eh* kemahiran *ya*. Tapi kita tetap latih bagaimana reporter itu bisa membuat judul yang, judul yang memenuhi syarat sebuah judul. Saya pikir itu.

15. P : Berarti faktor space itu mempengaruhi?

H : *Ya* mempengaruhi, mempengaruhi sangat. *Eh*, (sambil menunjuk pada salah satu koran), tentang NII cuci otak, itu tujuh koloman *ya*, tujuh koloman. Kalau itu disajikan misalnya di halaman ini, halaman satu tapi itu dua kolom. Tentu itu terlalu panjang judul semacam itu. Jadi judul itu juga tergantung pada *space*. Koloman *ya*, atau kuota *ya*, kuota. *Nggak* mungkin *eh* berita yang hanya dua kolom kok, judulnya lebih dari lima kata misalnya, *nggak* mungkin. (menunjuk

pada salah satu koran), satu, dua, tiga, empat, lima, itu *kan* lima kata. Itu *nggak* mungkin untuk dua koloman. Ini saja sudah terlalu, *eh* apa *ya*, terlalu, terlalu panjang *ya*.

16. P : Untuk penentuan judul, sub judul itu sendiri, itu bagaimana pak?

H : Itu redaktornya, itu redaktornya. Tapi nanti satu saat juga tidak bisa, kalau ini *kok* *nggak*, *kok* *nggak* enak *ya*, kayaknya *ya*. Ini dari segi bahasa *kok* nampaknya *kok* kurang pas dan sebagainya. Memang kerja kita kolektif tapi semua punya, apa *ya*, semua *eeh* punya kesempatan untuk memperbaiki, memperbaiki apakah ini layak tidak, apakah kata-katanya sudah enak dibaca, karena ini *kan* bacaan *ya*, koran itu *kan* dibaca. Akhirnya nanti ditemukan judul yang betul-betul pas *ya*. Ada redaktur sunting juga *ya*. Redaktur sunting itu juga punya kewenangan untuk memberikan masukan.

17. P : Berarti *eh* wartawan yang meliput berita juga ikut memberikan masukan *ya* pak?

H : Oh *ya*. Pasti iya. Kalau sudah baik, *ya* kenapa kita ubah, *kan* gitu *ya*.

18. P : Kembali ke kasus soal TKI tadi itu, sebenarnya *frame* dari KR sendiri itu apa pak dalam peliputan berita-berita, atau isu-isu seputar TKI?

H : *Ya*, saya kira *framenya* begini. *Eh* dimana-mana *ya*, dimana-mana hubungan TKI dengan pengguna jasa itu tidak seimbang *ya*. *Eh* Tidak egaliter. Selalu saja pengguna jasa menempati posisi yang lebih kuat ketimbang TKI. Dimana-mana. Meskipun dalam perjanjian secara tertulis adakalanya terkesan *fair*, terkesan *fair*. Namun sesungguhnya kalau kita cermati, *kan* mereka *kan* diikat dengan perjanjian. Sesungguhnya sudah tidak *fair*. Itu tetap ada pembebanan yang, apa, kewajiban TKI yang sudah tidak seimbang dengan *eh* kewajiban pengguna jasa. Tapi mengapa itu berlangsung karena memang TKI sangat-sangat butuh untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Maka perjanjian yang sebenarnya secara substansi itu merugikan TKI dibiarkan begitu saja. Karenanya, kita *ya* media, itu juga harus melakukan kontrol terhadap hal itu.

Karena salah satu fungsi media *kan* itu. Kontrol. Bahwa perjanjian itu tidak seimbang, merugikan TKI. Harus ada perbaikan, pembenahan, yang menempatkan TKI pada posisi sejajar. Undang-undangnya sudah bagus *ya*, cukup baguslah. Cukup bagus, *eh* karena pekerja dan pengguna jasa itu, itu ditempatkan seimbang. Itu normatif. Tapi implementasinya ketika sudah menjadi perjanjian, yang mencerminkan kedua belah pihak. Itu cenderung, apa, cenderung lemah. Saya pikir itu, jadi framenya begitu.

19. P : Jadi frame ini berlaku untuk TKI laki-laki maupun perempuan?

H : *Ya, ya*, sama aja. Hanya saja untuk perempuan itu, memang kita lebih memberi perhatian khusus *ya*. Karena secara fisik, kalau laki-laki mungkin ia punya kekuasaan untuk melawan, melawan secara fisik. Tapi kalau perempuan relatif ia cenderung mengalah, *eh* aksesnya terbatas, dan sebagainya. *Eh* kalau dibilang mungkin *kalah lincah* dengan laki-laki *lah*. Itu, secara fisik *ya*, secara fisik. Sehingga ketika dia dianiaya dan sebagainya, laki-laki dia bisa, bisa melawan, gitu *ya*. *Eh* tapi kalau perempuan, dianiaya oleh majikannya, dalam kondisi yang sangat lemah, dia habis kerja, sangat capek *gitu ya, gimana* mau melawan. Jadi, kita beri perhatian khusus bagi TKI yang perempuan.

20. P : Kembali ke teks berita yang saya analisis pak, yang saya bawa ini (menunjukkan berita-berita yang menjadi objek penelitian), ini *kan* menyangkut kasus yang terjadi pada pertengahan bulan November kemarin pak, kalau dilihat KR itu menurunkan beritanya itu sekitar tanggal 18 November, nah sementara beritanya itu, *eh* kalau saya lihat di media online itu tanggal 15 November itu sudah keluar. *Ehm*, sebenarnya, *angle* yang diambil KR itu sendiri seperti apa, menandakan bahwa berita masih sesuatu yang baru bagi masyarakat Jogja itu sendiri?

H : *Ya*, saya pikir, *eeh* ini *kan* media cetak yang tentu saja tidak seperti media elektronik yang bisa meliput kejadian saat itu juga *ya*. Kita juga mengakui bahwa pemberitaan terkait dengan TKI itu, karena peristiwanya memang tidak di Jogja, tapi kebanyakan diluar negeri. Saya juga punya *temen* banyak di Jakarta *ya, ya*

kadang kita agak terlambat oke *ya*. Kita agak terlambat, tapi bukan berarti kalau terlambat terus tidak dibaca, tidak seperti itu. Media lain, saya pikir untuk hal-hal tertentu juga mungkin terlambat. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih maju. Dalam kaitan TKI ini, mungkin saja iya, mungkin yang anda amati *eh*, apa, *eh*, mungkin tidak, apa, tidak saat itu juga, tidak secara cepat *gitu ya* mengabarkan. Tapi kita memandang bahwa tema itu masih aktual *gitu ya*, masih aktual, masih layak untuk diangkat, karena nanti akan berkelanjutan. Hari ini mungkin kita *agak* terlambat, *esok* mungkin kita akan lebih maju. Yang penting adalah bagaimana substansi itu, pesan itu bisa sampai ke pembaca, dengan tentu saja kita tidak mengabaikan aktualitas *ya*. Kita tetap aktualitas tetap menjadi salah satu poin *ya* karena milik kita. Saya kira itu.

21. P : Sebenarnya ada space khusus nggak pak yang disediakan untuk berita-berita soal ini?

H : kalau khusus, *eh nggak* ada. Kalau dulu sebenarnya ada *ya*, konsultasi soal ketenagakerjaan misalnya *ya*. Dulu pernah ada. Saya *nggak ngerti ya*, sekarang ini mungkin kadang kita itu memunculkan, besok *nggak* lagi. Saya akui, *ya* tidak bisa secara rutin.

22. P : Berarti tergantung kasusnya *ya* seperti apa?

H : Bukan tergantung kasusnya *ya*, tapi saya pikir tergantung kebijakan dari redaksi itu sendiri. Misalnya, kita sudah sangat banyak dengan berita-berita politik dan sebagainya, otomatis berita yang lain menjadi berkurang, atau porsinya menjadi lebih sedikit, *kan* itu. Itu persoalannya. Ketika kasusnya *wah* luar biasa banyak, *aduh ini mo* ditempatkan dimana?. Karena yang lain itu, konsultasi tenaga kerja misalnya, *kok* nampaknya *kok* belum, belum relevan misalnya, makanya tidak mendapat tempat, *kan* gitu *ya*. Prioritas *ya*, skala prioritas. Dengan halaman yang terbatas, tapi kita mengalternatif semua berita, *kan* gitu.

23. P : Kembali ke kasus yang ini pak (menunjukkan artikel yang diteliti), kalau saya baca, KR disini cenderung memberitakan apa yang dilakukan

oleh pemerintah. Tindakan-tindakan pemerintah itu seperti apa. Apakah disini berarti bahwa KR menyiratkan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap masalah BMP ini, atau TKI Sumiati ini pak?

H: *Ya, ya* memang itu faktanya pemerintah memberi perhatian *ya, ya* memang faktanya seperti itu, jadi kita *ya* mengangkatnya seperti itu juga. *Cuman, eh* mungkin, pembaca juga akan bisa menilai *ya*, akan bisa menilai, mengapa *eeh* pemerintah serius ketika *ya* kasusnya sudah sampai sejauh itu, *ya*. Kita memberi keleluasaan kepada pembaca juga untuk memberikan penilaian kepada pemerintah kita. Kita mengeluarkan *statement* apa adanya memang, apa adanya namun pembaca berhak menilai *statement* pemerintah itu. Bahwa kita bersikap pemerintah itu sebenarnya sudah sangat terlambat, bahkan *eh* ketika korban berjatuhan baru bergerak, itu pun tidak maksimal. Itu juga kita sampaikan. Namun, bukan dalam bentuk berita *ya*, tapi dalam bentuk opini *ya*, dalam bentuk opini. Itu sesungguhnya fungsi dari pers tadi, selain membuka informasi, juga kritik *ya*, tapi porsinya *kan* beda-beda. Tapi fungsi itu tetap kita lakukan. Kita sampaikan kepada publik. *Nih*.

24. P : Kalau saya lihat dari berita-berita ini kan narasumber yang diwawancarai itu kebanyakan menteri, presiden, anggota DPR, MPR, sama Komnas Perempuan. Apakah itu kebijakan dari redaksi sini untuk menyuruh wartawan di Jakarta untuk mewawancarai?

H: *Ya*, sebagian *ya*. Sebagian inisiatif wartawan. sebagian *iya*. ‘Tolong *you* cari narasumber di DPR yang bicara kritis *ya*, yang mengkritik pemerintah. Yang vokal. Memang ada pilihan-pilihan *ya*, jangan kemudian kita mencari narasumber yang kira-kira ini *eh* malah *ngegongi* istilahnya *ya*. *Ya* sudah *nggak* usah pakai aja *kan* gitu. Pilihan-pilihan itu memang ada pada redaksi, itu sesungguhnya pemilihan narasumber pun bagian dari independensi sebuah media. Bagi koran lain mungkin *eh* tidak memilih narasumber X *ya*, tapi saya memilih narasumber X. Mengapa begitu? *Ya* itulah independensinya.

25. P : Kalau dilihat soal ini *kan* masalah TKI yang perempuan *ya pak*. *Eh*, apakah tidak terpikir untuk menyajikan narasumber dari pihak pemerhati perempuan selain Komnas Perempuan, misalnya dari LSM atau intelektual, seperti itu pak?

H : *Ya*, saya pikir suara mereka akan sama. Komnas Perempuan sebenarnya itu representasilah dari kalangan-kalangan LSM yang cenderung suaranya itu sama *ya*, cenderung sama. Sehingga kita tidak perlu kemudian semua LSM kita, apa, kita hubungi, kita suruh *ngomong*, *nggak*. Kita sudah, *ya* mungkin sudah hafal *lah* bahwa mereka akan bersuara keras, mereka akan mengkritik pemerintah, dan sebagainya. Itu sudah representatif menurut saya. Dan kemudian ada unsur pemerintah, ada unsur DPR. DPR juga representasi dari rakyat *kan gitu*, kemudian dari eksekutif, tentu, karena itu menteri *ya*, dia punya *eh* kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan atau keputusan, dan LSM itu *stakeholder ya, stakeholder* yang sangat-sangat berkepentingan untuk memperjuangkan nasib TKI *ya*. Saya pikir itu sudah cukup representatif.

26. P : Kalau dalam berita-berita ini *kan* ada tindakan-tindakan pemerintah yaitu diantaranya itu yang pertama pemerintah mengirimkan nota protes, yang kedua pembentukan tim khusus, yang ketiga itu wacana pemberian *hp* sama wacana moratorium. Itu menurut bapak sendiri itu bagaimana tindakan pemerintah sejauh ini?

H : *Ya* kalau saya harus mengomentari itu, dalam beberapa, di Opini juga ada, karena itu *kan* lebih subjektif *ya*. Pendapat dari media, itu tidak langsung menyelesaikan masalah, pemberian *HP kan*. Bagaimana teknik pemberian *HP*, siapa yang mengontrol, *kan gitu*. Bagaimana kalau *HP*nya diminta oleh majikannya, *kan*. Jadi banyak aspek-aspek. Begini, jadi pemerintah itu terlalu menyederhanakan masalah. Dikiranya sudah diberi *HP* selesai. *Kan* masalahnya bukan disitu. Sejauh ini komunikasi antara pemerintah, perwakilan pemerintah di luar negeri dengan TKI itu sudah *nggak* beres menurut saya. Dengan adanya *HP* itu, itu hanya teknologi bukan kemudian mengubah, apa, strategi misalnya, strategi perlindungan TKI. *Nggak*, itu sangat-sangat *simple ya* kalau *HP*. Jadi, *eh*

KR sendiri menganggap itu sangat-sangat tidak efektif kalau pemberian HP. Itu pandangan saya atau pandangan media yang terungkap di Opini *ya*.

27. P : Kalau soal pendidikan untuk para TKI sendiri, kalau menurut bapak?

H : Pendidikan selama ini *kan* itu tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan di Indonesia yang menurut saya tidak komprehensif *ya*. Tidak komprehensif. Bahwa pendidikan itu hanya lebih ditekankan pada aspek keterampilan semata, tapi aspek yang lain mungkin terabaikan. *Ya* terabaikan. *Eh*, bahwa banyak TKI yang sebenarnya masih belum cakap *ya*, belum terampil tapi dipekerjakan. Menurut saya pembenahan itu harus dilakukan termasuk sarana dan prasarana. BLK-BLK yang tersebar di seluruh Indonesia, saya pikir harus direvitalisasi *ya*. Betul-betul itu di, apa, direhab sehingga lebih canggihlah, jangan kemudian satu alat digunakan untuk sepuluh, apa, lima puluh orang, *gitu ya*. *Gimana* mau bisa bagus, bisa maksimal *kan*, dari segi atau aspek peralatan. Dan lagi penanaman sikap misalnya. Kemudian bagaimana metode TKI untuk membela diri ketika ada serangan dari majikan misalnya. Itu perlu sekali. Dan saya yakin yang selama ini tidak, jarang disinggung bahkan *ya*. Pendidikan hanya pada aspek keterampilan belaka. Itu pun tidak maksimal. Ini yang terjadi. Menurut saya begitu.

28. P : Sejauh ini KR lebih memberitakan yang mana, apakah kekerasan terhadap TKI perempuan atau kekerasan terhadap TKI laki-laki?

H : Lebih banyak perempuan. Tentu saja lebih banyak ke kekerasan atau *ya* kekerasan, penganiayaan terhadap perempuan.

29. P : Itu bisa dijelaskan pak alasannya?

H : *Ya*, karena secara faktual memang begitu. Secara faktual perempuan lebih banyak jadi korban, dimana-mana. Bukan di luar negeri, tapi di dalam negeri pun demikian. *Trus*, saya tadi sempat singgung kalau TKI yang laki-laki relatif lebih *save ya*, lebih *save* karena mungkin, di Negara-negara Arab misalnya *ya*, mereka selamanya tidak ada hambatan *ya*, tidak ada hambatan mereka dari aspek

pergaulan dan sebagainya. Tapi kalau perempuan memang ada, apa, semacam aturan khusus *ya* kalau di luar negeri, di Negara-negara Arab. Mereka cenderung dirumah, walaupun di luar, dibatasi *macem-macem gitu, ya*. Ada prosedur yang mungkin tidak tetap *ya*. Yang lain gitu. *Ya* itu Negara-negara Arab biasanya ada aturan-aturan tertentu bagi perempuan. Itu yang kemudian membatasi mereka dan pembatasan itu justru membuat mereka rentan terhadap aksi kekerasan, begitu.

30. P : Ada pandangan-pandangan biasanya yang mengatakan bahwa media itu cenderung memberitakan kekerasan atau hal-hal yang negatif tentang TKI itu sendiri padahal kadang ada hal-hal positif dari TKI itu sendiri, misalnya prestasi mereka, bahkan ada yang bisa dari hasil kerjanya di luar negeri bisa melanjutkan studi, itu sebenarnya pandangan KR sendiri seperti apa?

H : *Ya*, sekarang kalau mau jujur, berapa *sih* presentasinya, bahwa mereka yang berprestasi, ialah kalau memang betul-betul berprestasi kita angkat. Tapi kalau mau jujur, lebih banyak yang berprestasi atau tidak. Lebih banyak yang menonjol atau tidak. *Eh*. Lebih banyak yang biasa-biasa saja *ya*. Yang betul-betul menonjol, yang dia bisa melanjutkan S2 dan sebagainya, berapa *sih* presentasinya, kayak *gitu*. Bukan berarti kita tidak, itu sangat bagus. Karena, kalau kita dapatkan narasumber, TKI yang demikian, yang mencari nafkah kemudian untuk studi S2, S3 dan sebagainya itu, itu sangat-sangat menarik dan sangat layak untuk diangkat sebagai berita, karena itu akan mendorong atau memotivasi yang lain untuk paling tidak meniru, itulah TKI yang sukses. Dan kita tidak menafikan hal-hal semacam itu. Kemungkinan *nggak ya*. Kalau mendapatkan kasus yang semacam itu sangat-sangat bagus.

31. P : Mungkin pertanyaan terakhir pak, secara keseluruhan terkait masalah-masalah TKI ini, arah pemberitaan KR itu sebenarnya seperti apa?

H : Arahnya adalah menempatkan TKI kita yang ada di luar negeri betul-betul dalam posisi dihargai *ya*, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bukan sebagai objek, bukan sebagai barang yang selama ini ditunjukkan oleh para pengguna jasa.

Bahwa kontrak itu bukan saja kontrak secara fisik, secara fisik bahwa pengguna jasa menggunakan tenaga fisik TKI itu, *enggak*, tapi ada kontrak moral yang dibangun. *Nah*, caranya pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan lagi *agreement* dengan para pengguna jasa yang di luar negeri, sejauh mana *kerjaan* mereka untuk melindungi TKI kita yang ada di sana, sehingga kasus-kasus semacam ini *ya*, seperti yang anda teliti itu tidak akan terjadi. Kemudian apa, *punishment*, hukuman yang berat bagi pelanggar hak-hak TKI, itu harus betul-betul ditegakkan. Jangan karena uang, kemudian melemahkan penegakkan hukum bagi para TKI kita.

B. Transkrip Wawancara dengan Hasto Sutadi (Redaktur Nasional KR pada Selasa, 26 April 2011 di Kantor Redaksi KR)

Biodata singkat:

Nama : Drs. Hasto Sutadi
 Pendidikan : Lulusan FISIPOL UGM Jurusan Komunikasi
 Pekerjaan : Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
 Jabatan : Redaktur Nasional

1. Peneliti (P) : Sebenarnya alur produksi berita di KR itu seperti apa pak?

Hasto (H) : Iya, tadi pak Hudono *udah* cerita *ya*. *Ya* mungkin *ya* sebatas yang saya kerjakan *ya*. Menerima naskah-naskah dari Jakarta, saya yang menerima, mengedit, mengemas berita itu, menarik atau *nggak*, menentukan judul dan subjudul. Semua yang melakukan saya. Pokoknya kiriman berita dari teman-teman di Jakarta itu masih mentah isinya, saya yang mengedit, jadi, langsung ke bagian *layout*.

2. P : Berarti kalau untuk wartawan-wartawan di Jakarta hanya meliput *gitu*. Terus mereka menulis juga, tapi untuk yang diterbitkan itu berarti bapak yang mengedit *ya*?

H : Iya, iya. Biasanya mereka juga belum ada kopnya juga, kadang masih *ya acak-acakan* lah, ada beberapa yang *emang* sudah jadi. Tapi *malah* ada beberapa kalimatnya yang beda *gitu ya*, terpaksa kita harus edit dulu *ya*.

3. P : Sebenarnya ketika meliput berita itu pedoman apa saja *sih* pak yang digunakan?

H : *Ya* mungkin masih sama seperti yang diajarkan, sebagai suatu sains *kan* masih tetap menjadi pedoman bagi kami untuk mengedit berita. Terutama yang kita tonjolkan adalah bagaimana *ya*.

4. P : Bagaimana suatu peristiwa itu *ya* yang lebih ditekankan?

H : Iya.

5. P : Dalam peliputan suatu berita itu apakah ada kontrol atau *eh* tekanan dari pihak luar misalnya, dalam pemberitaan di KR sendiri pak?

H : Belum pernah *ya*, kayaknya belum pernah. Khususnya untuk terkait dengan yang masalah TKI *ya*. Karena memang mungkin *ya* reporternya di Jakarta. Kita *nggak* tahu kondisinya di Jakarta kayak apa. Tapi yang jelas kita tetap menerima itu. Kalau yang disini *ya* *nggak* pernah ada tekanan.

6. P : Sebenarnya kebijakan redaksional di KR sendiri itu dalam pemberitaan itu seperti apa pak?

H : *Ya* mungkin yang paling sederhana *ya* itu *ngono yo ngono neng ojo ngono*. Kita memang kalau mau memberikan kritik *ya* kritik yang membangun, tidak perlu yang vulgar atau yang kasar seperti media-media yang lain *ya*. Kita cukup santun juga.

7. P : Berarti termasuk dalam pemberitaan soal TKW itu juga *ya* pak?

H : Iya. Kebetulan memang teman-teman di Jakarta *stylene*nya juga *gitu ya*. Jadi kita agak enak juga mengemasnya.

8. P : Kalau, biasanya kebijakan redaksi itu implementasinya dalam memberitakan peristiwa seputar BMP itu, khususnya terkait dengan peristiwa kekerasan terhadap BMP itu gimana pak implementasi kebijakan redaksi?

H : *Ya* seperti tadi. *Ya* mungkin kita *ya*. Apa *ya*. *Meng apa* yang sudah disyaratkan tadi. Kemudian kita juga, kalau ada *ya*, kita cari *kan* solusinya juga. Kemudian kalau dari Jakarta kita mungkin bisa minta pengamat *ya* mengenai solusinya.

9. P : Berarti solusinya itu misalnya mewawancarai narasumber-narasumber tertentu ya?

H : Iya, narasumber yang terkait dengan berita itu.

10. P : Itu biasanya untuk mewawancarai narasumber seperti itu apakah ada ditentukan dari redaksi, ditentukan siapa yang harus diwawancarai?

H : Kadang-kadang kalau memang itu *anu ya* sangat, kita sangat butuh sekali. Kita bisa menugaskan dari teman di Jakarta. Tapi kalau memang waktunya kita *nggak, nggak nyampe gitu*, kita *kan* juga terpaksa membuka *anu*, kita *kan* langganan *Antara*, kita cari-cari dari antara ada *nggak ya* yang terkait dengan masalah itu, semacam pembanding, kalau memang bagus *ya* bisa kita masukan, kalau memang *nggak nyampe ya* kita menugaskan dari Jakarta juga *ya* untuk bisa melaksanakannya.

11. P : Apakah wartawan sendiri bisa menentukan sendiri siapa yang harus diwawancarai, apa harus dari kebijakan redaksi?

H : Kadang juga bisa, wartawan juga punya idenya sendiri. Narasumber mana yang mau diwawancarai. Kita juga bisa meghubungi kalau Jakarta memang sulit, nanti kita bisa kembangkan ke teman-teman yang di Jogja, redaksi yang bisa mencari narasumber lain.

12. P : Biasanya pak dalam peliputan berita itu ada nggak seperti pandangan untuk keberpihakan seperti itu?

H : Saya kira *anu ya*, kita tetap *anu ya*, netral *gitu ya*. Jadi memang kalau memang ada kasus itu *ya*, itu dulu yang kita ungkap. Lalu beritanya Kita juga berimbang. Jadi ada pembandingnya dari narasumber yang terkait. Kita tetap netral *ya*, meskipun sedikit banyak *ya* memang kita berpihak *ya* pada, terutama kalau yang para korban-korban itu *ya*. Kita masih berpihak.

13. P : Untuk masalah teks beritanya sendiri pak (sambil menunjukkan berita yang diteliti), itu apakah judul, sub judul itu dibuat oleh wartawan atau nanti ditentukan dalam rapat redaksi atau seperti apa pak?

H : *Ya*, kalau kop itu *anu* otomatis kewenangan saya. Iya, *nggak* pernah rapat redaksi menentukan. *Eh* masing-masing redaktur *ya*, yang menentukan kop.

14. P : Jadi, wartawan tidak *ya*?

H : Kadang-kadang wartawan *anu ya* buat kop sendiri. Tapi *kan* nanti kita tetap yang punya pertimbangan, 'kira-kira kalau yang seperti ini *gimana*', *nah* kita yang paling bisa menentukan. Paling juga, begitu kiriman dari Jakarta masuk, kita *cuman* liat dulu, kadang ada yang kasih judul ini, ini, ini. *Ya* paling tidak kita sudah tau, oh yang dimaksud ini. Nanti kita olah, oh ternyata yang menarik untuk kop yang ini.

15. P : Itu ada standarisasinya *nggak sih* pak untuk pembuatan, penetapan judul seperti itu?

H : Saya kira *anu ya*, dari masing-masing redaktur *aja*. *Nggak* ada patokan yang *gimana*. *Ya*, paling tidak kita cari yang paling menarik.

16. P : Berarti seumpamanya faktor, apakah faktor pembaca juga dipertimbangkan seperti itu?

H : *Ya*, tentunya kita waktu memberi judul, kita kadang memposisikan diri sebagai pembaca, sebagai masyarakat *ya*. Kalau kayak *gini* kira-kira tertarik *nggak gitu* terhadap teksnya. Kita tetap memberi simpati kepada masyarakat.

17. P : Biasanya kalau dari judul-judul itu *kan* saya lihat pak, kadang biasanya judul itu di dalam *lead* sendiri itu, judul bukan bagian dari *lead*. Biasanya itu lebih pada bagian tubuh berita. Itu memang seperti itu ya kebijakan redaksinya?

H : Kadang malah ada *anu ya*, kadang ada di bagian paling bawah. *Ya*, karena mungkin waktu *ngeditnya*, kita dikejar *dateline ya*, kita sudah selesai, *tau-tau* ada tambahan masuk informasi, kita *nggak* mungkin bisa merubah semuanya, kita taruh dibawah, tapi *kan* yang menarik yang dibawah *ya*, terpaksa kita diangkat *gitu*. Tapi *kan* kalau idealnya, kalau masih *nggak* mendadak *ya*, kadang-kadang kita pakai piramida terbalik. Tapi, kalau materinya sudah *mepet* sekali *ya* terpaksa kita paksakan dibawahnya.

18. P : Berarti biasanya penentuan judul itu, *nggak mesti* harus dibahas di *lead*, seperti itu ya pak?

H : *Nggak*. Kadang-kadang *ya* itu, kita sering pakai piramida terbalik. Kadang menyiasati halaman yang terbatas sekali, terutama untuk halaman luar *ya*, di luar *kan* sangat terbatas sekali, kadang terpaksa itu dipotong-dipotong, akhirnya *ya* yang paling menarik yang kita angkat *ya*.

19. P : Biasanya kalau dalam teks berita itu, narasumber biasanya *kan* ada urutan-urutan *gitu, eh* apakah ada ketentuan untuk urutan narasumber dalam teks berita? Soal pandangan-pandangannya ditempatkan pada paragraf sekian.

H : *Ya*, saya kira *nggak*. Biasanya *emang, ya* kita *anu*, apa yang paling menarik *aja* yang diceritakan narasumber. Yang paling benar yang kita angkat. Kita *nggak* ada patokannya untuk berunding ini, ini, ini. Tergantung *statement* mereka *aja*.

20. P : Itu *kan* pak, biasanya di berita khususnya diberita yang ini soal yang saya teliti ini, *eh* ditulis oleh beberapa wartawan, itu biasanya penulisannya seperti apa *ya* pak, apakah yang menggabungkan nanti dari pihak redaksi atau bagaimana pak?

H : *Ya*, kadang dari Jakarta sendiri *udah, udah, anu ya*, gabungan *gitu*. Tapi kadang-kadang *ya* belum. Termasuk tadi yang kayaknya harus, harus ada tambahan dari pakar, itu nanti *kan* teman-teman juga bisa bantuin. Ini, *ya* memang macam-macam. Cuma ada yang masuk sendiri-sendiri, nanti kita yang atur.

21. P : Jadi dari pihak redaksi yang menggabungkan tulisan dari wartawan-wartawan itu *ya* pak?

H : Iya.

22. P : Biasanya kalau untuk penentuan suatu berita itu yang menentukan berita itu harus dimuat itu, siapa *ya* pak? Terus sistemnya itu bagaimana?

H : Yang paling menentukan *ya anu*, biasanya rapat malam. Ini *kan* sebentar lagi rapat, rapat media. Nanti kita, kita inventarisir *ya*, naskah-naskah yang masuk ini apa, bawah apa, ini menarik *nggak*, ini menarik *nggak*, dan yang terpenting kita lihat *spacenya ya*. Ada *nggak*, kayak, kayak malam ini, kayaknya halaman belakang aja ada banyak, lebih separuh. Kita harus benar-benar selektif *gitu ya*. Tapi memang kalau terpaksa mau diadakan, kita *ya* bikin secepat-secepat, itu yang penting.

23. P: Berarti penentuan suatu berita itu, layak diberitakan itu berdasarkan rapat redaksi?

H : Untuk halaman nasional, *ya*. Untuk halaman luar *ya*. Kalau untuk yang halaman-halaman dalam, halaman daerah itu, *ya* sudah *nggak* perlu rapat redaksi. Biasanya redaksi *aja* yang paling tau. Biasanya sudah punya patokan bahwa, ini, ini, yang layak dimuat. Tapi tidak perlu harus melibatkan rapat redaksi. Kalau yang nasional, *ya* itu tadi, kita rapat paling tidak sekitar jam tujuh sampai jam delapan malam.

24. P : Kalau berita-berita nasional itu pak, biasanya *kan* ditaruh di halaman depan *ya* pak. Nah itu, untuk berita nasional *kan* yang

memberitakan itu, KR *kan* sebagai koran lokal, biasanya harian umum nasional juga turut memberitakan. Itu biasanya *angle* yang diambil KR untuk membedakan antara pemberitaan KR dengan harian nasional itu seperti apa pak?

H : *Kan* kita cari *anu ya*, mungkin yang sudah diajari, aspek proximity itu ya, itu yang kedekatan dengan kita itu. Misalnya soal yang mudah-mudah *aja ya*, soal UNAS kemarin *ya*. Kita cari ada *nggak* yang dari Jakarta terkait dengan kondisi Jogja. Nah, itu mungkin kita yang nyediain. Kalau yang masalah TKI, ada *nggak* TKI-TKI yang dari Jogja. *Nah* itu dulu yang kita dahulukan. Berita nasional tapi faktor kedekatannya dengan Jogja itu yang kita angkat.

25. P : Kalau untuk kasus-kasus besar itu pak, seperti kasus Gayus kemarin, itu bagaimana?

H : Itu saya kira hampir, hampir *anu ya*. Kita memang bertarung dengan media elektronik dan media-media nasional. Tapi, setidaknya kita harus memberitakan, ada *gitu loh*, kemudian *ya*, sebaiknya nasional itu jangan sampai ketinggalan tapi kita tetap fokusnya, karena ini juga koran lokal, harus ada sebuah penemuan lain.

26. P : Mungkin kembali ke permasalahan yang saya teliti ini pak, *eh* buruh migran perempuan, lebih ke pandangan bapak secara pribadi, sejauh mana bapak mengetahui permasalahan ini dan bagaimana pandangan bapak terhadap permasalahan-permasalahan berkaitan dengan TKI perempuan?

H : Saya kira itu kembali ke keputusan pemerintah sendiri, seharusnya kalau memang di tanah air *nggak* bisa menciptakan lapangan kerja, *ya* memang mau tidak mau kita harus mengekspor mereka. Tapi memang harus ada bekal keterampilan. Tidak hanya bekal keterampilan, tapi mungkin *ya*, bahasa dan sebagainya. Agar mereka tetap bisa eksis dan dihargai *gitu loh*. Mereka bukan hanya sebagai pembantu atau apa misalnya. Tapi, mereka memang memiliki keterampilan untuk kerja di luar negeri *ya*. Jadi memang, kayaknya memang ada gugatan *gitu ya*, harus punya keterampilan, jangan salah-salah memilih biar nanti mereka tidak bisa dipermainkan oleh para majikan. Seperti itu.

27. P : Menurut bapak, kira-kira pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini apakah hanya pemerintah, atau bagaimana?

H : Saya kira pemerintah yang nomor satu. *Ya* itu tadi, ketegasan pemerintah. Soalnya ada PJTKI-PJTKI yang nakal itu, yang memberangkatkan itu. *Ya* pemerintah harus bertindak tegas, *gimana* caranya mereka tidak boleh mengirim atau diklaim gitu. Sebenarnya pemerintah juga harus punya mekanisme sendiri *ya* untuk mengatasi masalah ini.

28. P : Sebenarnya dalam memberitakan masalah-masalah seperti ini apakah ada pertimbangan tertentu untuk mengangkat masalah seperti ini?

H : Saya kira tergantung *newsnya* itu. Pas-pas waktu itu ada, kalau memang *newsnya* ada kita angkat. Kalau memang yang ada biasa-biasa *aja*, saya kira *nggak*.

29. P: Apakah ada tujuan untuk mengiring masyarakat terhadap pemahaman tertentu atau bagaimana?

H : *Ya* kalau bisa, intinya kita juga memberi pemahaman kepada masyarakat terutama kepada calon-calon TKI, memiliki kewenangan *ya* untuk bisa bekerja di luar negeri dan memang mendapatkan bekal keterampilan.

30. P : Menyangkut tentang pandangan KR secara umum. Sebenarnya KR sendiri memandang peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap buruh migran perempuan ini seperti apa?

H : *Ya* kita kadang menempatkan diri sebagai masyarakat dan juga penyalur aspirasi masyarakat, itu di satu sisi. Dan kita juga memberi semacam sosialisasi kepada masyarakat, *ya* seperti tadi itu, pemahaman masyarakat terhadap TKI.

31. P : Kadang biasanya asumsi yang mengatakan bahwa, media itu kadang hanya memberitakan tentang hal-hal negatif mengenai mereka tapi hal-hal positif itu tidak diberitakan, dan itu biasanya membentuk persepsi

orang tentang keberadaan mereka. Pandangan KR sendiri itu seperti apa pak?

H : Kayaknya *ya* seperti itu memang masih banyak dilakukan *ya*. Memang *kan* ada, dulu *kan* ada prinsip *bad news is a good news ya*. Kita mulai pelan-pelan merubah itu. Kita juga sesekali perlu mengambil kayak TKI yang lulus, yang berprestasi.

32. P : Berarti tidak ada, seperti tujuan tertentu untuk mengangkat kasus ini. Apa ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengangkat kasus ini?

H : Sebenarnya *nggak* ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kita juga tergantung kasusnya aja.

33. P: Untuk kebijakan redaksi sendiri, apakah ada kebijakan redaksi tentang penulisan berita seperti itu. Tentang penggunaan kata atau bagaimana. Apakah ada kebijakan redaksi? Atau terserah dari wartawannya sendiri atau seperti apa?

H : *Ya*, seperti tadi, kita mengolah bahasa menjadi lebih santun, itu aja, *ya* mudah dipahami, dan bisa dimengerti mereka-mereka yang membacanya.

34. P : Sebagai kesimpulan pak, tentang permasalahan buruh migran perempuan ini, pandangan bapak seperti apa?

H : Sebenarnya *ya*, seperti yang tadi *ya*. Pemerintah harus tegas.

C. Hasil Wawancara dengan Wartawan Nasional KR Syaifullah Hadmar melalui Email (salah satu wartawan yang meliput berita yang penulis teliti dengan inisial nama “ful”)

Biodata Singkat:

Nama : Syaifullah Hadmar

Pekerjaan : Wartawan Nasional SKH Kedaulatan Rakyat

Jabatan : Kepala Biro Redaksi Kedaulatan Rakyat Jakarta

1. Peneliti (P): Menurut SKH KR, berita tentang BMP/TKW masuk ke dalam bidang apa atau termasuk kasus yang multidimensi?

Syaifullah (S) : Berita yang menyangkut TKW masuk pada bidang Kesra. Menjadi kasus multidimensi karena terjadinya tindak kekerasan yang menimpa TKW yang bersangkutan. Padahal, tujuannya meninggalkan Indonesia adalah untuk mengubah nasib supaya lebih baik. Ternyata, tidak semua yang dialami TKW itu bernasib baik karena ada yang dianiaya, tidak dibayar bahkan yang paling tragis dibunuh majikan. Walhasil, kasus yang menimpa TKW merupakan kasus yang multidimensi sehingga peran negara (pemerintah) melindungi rakyatnya sangat dibutuhkan.

2. P : Ketika meliput berita, pedoman apakah yang digunakan oleh wartawan?

S : Perhatian pertama adalah menyadari tidak semua peristiwa dapat dijadikan berita. Untuk mengenali peristiwa mana yang dapat jadi berita, tergantung penciuman wartawan bersangkutan. Namun begitu, untuk melihat nilai berita (news value) antara lain ada unsure konflik, dampak yang menyangkut masyarakat, sesuatu yang menarik di tengah kehidupan manusia dan lainnya.

3. P : Ada tidak kontrol dari pihak luar terhadap pemberitaan KR?

S : tidak ada.

4. P : Apakah ada kebijakan redaksional di SKH KR dalam pemberitaan?

S : Sebagai media yang berada di daerah, maka kebijakan yang ada berupa perhatian atas pemberitaan yang berkaitan dengan keberadaan media itu sendiri. Artinya, kalau ada peristiwa yang berskala nasional di daerah tempat penerbitan KR, maka dapat dikembangkan sehingga ada kesinambungan dari peristiwa yang sedang actual tersebut. Selebihnya, kebijakan redaksional adalah berita-berita yang bersifat nasional dari pusat pemerintahan.

5. P : Bagaimana implementasi kebijakan redaksional SKH KR dalam memberitakan peristiwa seputar BMP/TKW, khususnya terkait dengan peristiwa kekerasan terhadap BMP/TKW?

S : Khusus yang menyangkut pemberitaan TKW, kebijakan redaksional KR selain memberitakan keberhasilan, juga peristiwa yang menimpa TKW, seperti penganiayaan atau bentuk pelanggaran HAM lainnya.

6. P : Adakah kecenderungan keberpihakan dalam pemberitaan yang dibuat wartawan berdasarkan kebijakan redaksional SKH KR? Jika ada, mengarah ke mana dan mengapa? Untuk kasus ini bagaimana?

S : Pemberitaan yang ditulis wartawan, tentu selaras dengan kebijakan redaksional. Namun, untuk yang menyangkut kasus TKW, misalnya, hampir semua media yang ada selalu berpihak pada nasib TKW.

7. P : Pada tingkatan ideal institusi pers, ada yang menghendaki kenetralan dan ada yang menghendaki keberpihakan, bagaimana menurutanda? Untuk kasus BMP/TKW, bagaimana sikap anda?

S : Ada beberapa sisi yang menjadi sudut pandang pemberitaan. Tentu, sebelum terjadi suatu kasus ini, biasanya agen pemberangakatn dari TKW pun menjadi sorotan, termasuk kebijakan terhadap rekrutmen, juga sikap pemerintah atas pembelaan terhadap nasib rakyatnya.

8. P : Apakah judul dan sub judul dalam berita dibuat oleh wartawan atau redaksi?

S : Kadang dari wartawan, kadang pula sesuai selera redaktur.

9. P : Jika wartawan yang membuatnya, apa maksud dari judul dan sub judul yang ditulis untuk tiap-tiap berita?

S : Judul tentu sesuai dengan isi berita. Sedang sub judul untuk membahas masalah lain yang ada korelasinya dengan pemberitaan yang ada.

10. P : Bagaimana penentuan urutan narasumber yang ditulis dalam teks berita?

S : Untuk hal ini tidak ada ketentuan yang baku. Namun, wartawan biasanya menempatkan narasumber sesuai dengan ketokohan dari narasumber yang bersangkutan.

11. P : Apakah ada aturan yang dibuat mengenai panjang berita yang dapat dan harus diikuti?

S : Aturan panjang berita ini, tergantung dari nilai aktualitas berita. Meski begitu, tidak secara langsung wartawan yang menulis sudah menyadari akan keadaan halaman yang tersedia, mengingat iklan juga penting untuk diberi ruang.

12. P : Bagaimana penentuan isi, lead, dan paragraf penutup dalam berita?

S : Penentuan isi tidak terlepas dari *lead* yang merupakan rangkuman dari hal-hal yang terpenting dalam berita. Setelah itu, fakta dan data disajikan melalui penjelasan dalam setiap paragraf.

13. P : Isi berita sendiri, ada tulisan dari beberapa wartawan, bagaimana penulisannya?

S : Berita yang ditulis beberapa wartawan merupakan rangkuman dari satu peristiwa yang disajikan. Artinya, dalam satu berita bisa menyajikan beberapa narasumber yang kebetulan diperoleh para wartawan bersangkutan dengan waktu dan tempat berbeda, tetapi materi pembahasannya sama.

14. P : Siapakah yang menentukan berita dapat di muat dan bagaimana sistemnya?

S : Redaktur yang bertanggungjawab pada halaman nasional, maka dapat menentukan berita yang actual dan berskala nasional pula.

15. P : Terkait peristiwa BMP/TKW, sejauh mana anda mengetahui permasalahan ini? Bagaimana pandangan anda? Pihak yang bertanggung jawab?

S : Peristiwa yang menimpa TKW sebenarnya beragam. Misalnya, dari masalah gaji *gak* dibayar sampai masalah penganiayaan. Untuk persoalan gaji tentu yang bertanggungjawab adalah majikan, namun untuk menyelesaikan supaya hak TKW didapat maka antara agen yang berada di Indonesia dan di negara penempatan harus membantu. Demikian halnya yang menyangkut penganiayaan terhadap TKW. Khusus untuk masalah tindakan penganiayaan negara juga harus turun tangan sehingga ada penyelesaian yang baik, misalnya melalui diplomatik.

16. P : Bagaimana anda menggambarkan sosok BMP/TKW?

S : TKW adalah sosok manusia yang 'kalah' untuk mengubah nasib di negerinya. Ini terjadi karena lapangan kerja yang belum tersedia alias belum dapat menampung para TKW. Lalu, mereka berusaha mencari jalan lain dan salah satunya adalah mengikuti rekrutmen yang dilakukan pengarah tenaga kerja. Padahal, kemampuan (skill) yang dimilikinya tidak memenuhi sama sekali. Ini karena latar belakang pendidikannya juga mayoritas SD, bahkan ada yang *gak* tamat. Nah, kalo kerja keluar negeri bagaimana *ya*?

17. P : Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman tertentu?

S : Pemberitaan khusus TKW baik yang berhasil maupun yang gagal, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca yang lebih luas. Namun, khusus untuk yang menyangkut peristiwa yang menimpa TKW tentu harapan yang ingin dicapai supaya masyarakat yang ingin bekerja ke luar *negri* harus memiliki kemampuan supaya bisa memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya.



Korannya Rakyat
1945

AN LONGSOR-BANJIR DI BANYUMAS
PURWOKERTO-TEGAL

Harian Pagi
24 Halaman
Harga Eceran Rp. 2.000

Korannya Rakyat

Korannya Rakyat



servis... lumine
veritatis

Korannya Rakyat

Kedaulatan Rakyat sebagai sebuah merk legendaris di Indonesia yang terbit sejak 27 September 1945, hanya beberapa hari setelah proklamasi Republik Indonesia dimana ketika itu dibutuhkan sumber informasi bagi rakyat untuk menyebarkan semua aspirasi dan semangat perjuangan, sekarang setelah 65 tahun berlalu Kedaulatan Rakyat tetap setia bersama rakyat berkarya dan menyebarkan informasi yang benar dan berimbang dengan cepat dimana hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Koran Kedaulatan Rakyat ingin tetap menyebarkan informasi tersebut dengan cepat dan tepat sasaran. Maka seluruh jurnalis KR siap untuk menangkap dan mencari informasi serta mengolahnya dengan objektif serta berimbang sampai kemudian menyebarkan lembaran lembaran berita dari koran kebanggaan rakyat ini keseluruh penjuru daerah dalam pekat dan dinginya malam supaya bisa diterima oleh pembaca pada saat yang tepat untuk menemani rakyat berkarya.

Menyajikan informasi yang aktual bukanlah hal yang mudah disaat ini, karena itu Koran Kedaulatan Rakyat berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Untuk memenuhi selera para pembaca, Kedaulatan Rakyat berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya, karena Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya.

Lahir Bersama Bangsa

Didirikan oleh H. Samawi (1913 - 1984) dan M. Wonohito (1912 - 1984). Dan para penerusnya yaitu Dr. H. Soemadi M. Wonohito, SH dan Drs. H.M. Idham Samawi merawat dan melanjutkan perjuangan para pendiri Kedaulatan Rakyat. Hingga saat ini Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh direksi-direksi:

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Pemasaran
Direktur Produksi
Direktur LitBang

Drs. HM Romli
Imam Satriadi, SH
Fajar Kusumawardhani, SE
Sugeng Wibowo, SH
H.M. Wirmon Samawi, SE, MIB

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Drs. Octo Lampito, MPd.

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. H. Ahmad Luthfie, MA, Ronny Sugiantoro, SPd, SE, MM

Redaktur Pelaksana

Drs Hudono, SH, Joko Budiarto, Musshada

Manager Litbang Diklat Redaksi

Wismoko Poernomo

Manager Produksi Redaksi

Ngabdul Wakhid

Pemimpin Perusahaan

Fajar Kusumawardhani, SE

Manager Sirkulasi

Purwanto Hening, BSc

Deputi Iklan

Aghus Heraswoto

Seiring dengan dinamika dan keinginan untuk menjumpai masyarakat kini Kedaulatan Rakyat telah menerbitkan berbagai media baru baik cetak yaitu Minggu Pagi dan Koran Merapi serta KR Radio 107.2 FM dan tidak ketinggalan krjogja.com dalam naungan KR Group.

Apa Yang Kami Raih

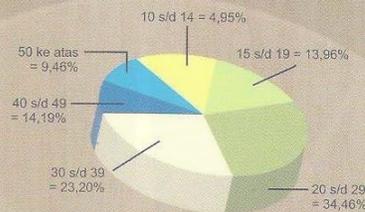
Cakram Award 2006 sebagai media cetak lokal terbaik 2006.

10 Besar Koran Terbaik 2005 dari Dewan Pers.

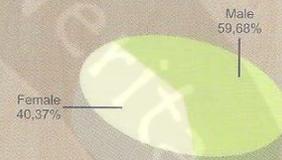
Peringkat 4 (empat) perolehan iklan nasional periode Januari - Desember 2005 menurut survey Nielsen Media Research.

Peringkat 7 (tujuh) jumlah pembaca pada kategori All People menurut survey Nielsen Media Research Wave III th 2006.

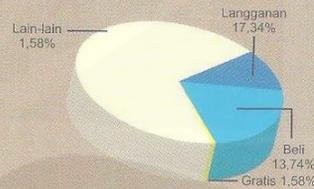
Siapa Pembaca Kami



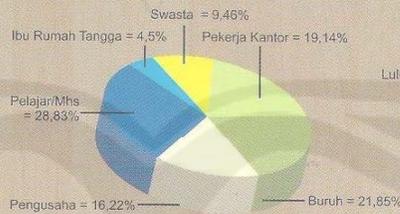
Profil Usia



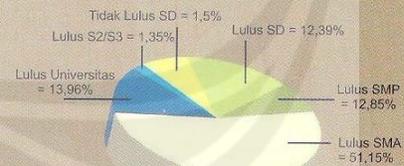
Profil Jenis Kelamin



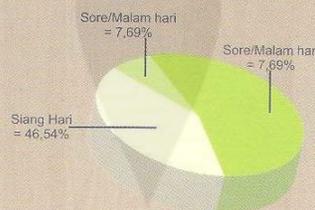
Cara Dapat KR



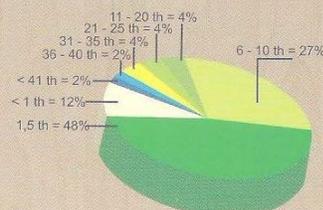
Profil Pekerjaan



Profil Pendidikan



Waktu Baca



Lama Baca



Tiras

Derah Istimewa Yogyakarta		Daerah-Daerah Lainnya	
Kota Yogyakarta	49.229	Jawa Tengah	12.211
Sleman	35.534	Jawa Timur	724
Bantul	14.758	Jawa Barat	352
Kulon Progo	4.036	DKI Jakarta	1,937
Gunung Kidul	5.670	Kalimantan	88
		Sumatera	9
		Bali	24
JUMLAH	109.227	JUMLAH	15.312
TOTAL 124.539			

Tarif Iklan

1. Iklan Umum/Display	: Rp. 19.000,-/mm kl
2. Iklan Keluarga	: Rp. 10.000,-/mm kl
3. Iklan Baris/Cilik (min. 30 baris, maks. 100 baris)	: Rp. 11.000,-/baris
4. Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm)	: Rp. 10.000,-/mm kl
5. Iklan Khusus: ukuran 1 kl x 45 mm Wisuda (lulus studi D1- S1), Pernikahan, Ulang Tahun	: Rp. 175.000,-
6. Iklan Warna Full Colour	: Rp. 35.000,-/mm kl
7. Iklan Kuping (ukuran 2 kl x 40 mm)	: 500% dari tarif
8. Iklan Halaman 1 (min. 2 kl x 30 mm, maks. 2 kl x 150 mm)	: 300% dari tarif
9. Iklan Halaman Terakhir	: 200% dari tarif

Catatan

- Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%.
- Permintaan halaman yang bersifat mengikat dikenakan tambahan 25% dari tarif.
- Iklan kreatif, center spread, dikenakan tambahan 25% dari tarif.
- Space iklan full colour minimal 600 mm kl.
- Tinggi iklan 500 mm kl dihitung dengan tariff maksimal 530 mm kl.
- Materi iklan berupa materi siap cetak (FA / Film), CD, Flashdisk, E-Mail.
- E-Mail iklankr04@yahoo.com dan iklankryk@gmail.com.

Tarif Pariwara

1. Ukuran	: - 1 halaman FC	: Rp. 65.000.000,00
	: - 1 halaman BW	: Rp. 32.500.000,00
2. Ukuran	: - ½ halaman FC	: Rp. 33.000.000,00
	: - ½ halaman BW	: Rp. 16.500.000,00
3. Ukuran	: - ¼ halaman FC	: Rp. 33.000.000,00
	: - ¼ halaman BW	: Rp. 16.500.000,00

Catatan

- Ukuran minimal ¼ halaman.
- Tinggi pariwara 500mm dihitung dengan tarif maksimal 530 mm.
- Harga belum termasuk biaya desain dan film.
- Harga tersebut belum termasuk PPN 10%.
- Pembayaran tunai di muka sebelum pemuatan.
- Gambar/produk maksimal sebesar 25% dari space yang ada.
- Materi jadi (siap cetak) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemuatan.
- Materi mentah (proses) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemuatan.

Data Media

Nama Media

Harian Umum Kedaulatan Rakyat.
Terbit 27 September 1945, 40 hari setelah Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia. Merupakan Koran pertama di
Era Republik Pelopor Pers Pancasila.

Haluan

Independent

Motto

Migunani Tumraping Liyan.
Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar
bagi orang lain. Berguna bagi sesama membuat hidup lebih berarti

Perintis

H. Samawi (1913 - 1984) & M. Wonohito (1912 - 1984)

Penerbit

PT. BP. Kedaulatan Rakyat

SIUPP

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986. Tanggal 4 Desember 1990

Alamat Redaksi

Jl. P. Mangkubumi 40-42-44-46, Yogyakarta 55232
Telp. (0274) 565685 (hunting) Faks. (0274) 563125

Alamat Percetakan

Percetakan Kedaulatan Rakyat
Jl. Raya Yogya - Solo Km 11, Sleman, Yogyakarta - 55573
Telp. (0274) 496549, 496449

Bank

Bank BNI - Rek. Giro No. 003 044 0854
Bank Bukopin - Rek. No. 1000 103 043
Dinas Giro dan Cekpos No. j.15.78

Alamat Homepage

<http://www.kr.co.id>

Alamat Email

Redaksi : redaksi@kr.co.id Iklan : iklankryk@gmail.com

Alamat Perwakilan

Jakarta Kedu Selatan

Jl. Utan Kayu No. 104 B **Jl. Veteran Blok A Kav. 6**
Jakarta Timur - 13120 **Purworejo Plaza Purworejo,**
Telp. (021) 8563602 Telp. (0275) 321848
Faks. (021) 8500529

Purwokerto

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 5 **Jl. Pandanaran Ruko No. 2-3**
Purwokerto, **Bendogantungan Klaten**
Telp. (0281) 622244 Telp. (0272) 322756

Gunung Kidul

Jalan Sri Tanjung No. 4 Purwosari, **Jl. Lamoersari No. 62 - Semarang**
Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, **Telp. (0274) 8315792, 8448622**
Telp. 393562, 394707

Surakarta

Jl. Bhayangkara No.13
(lama No. 42)

Surakarta - 57141
Telp. (0271) 718015

Kulonprogo

Jalan Veteran no 16 Wates,
Telp. 774738

Kedu Utara

Jalan Achmad Yani no 133, Magelang
Telp. (0293) 363552 dan 362503

MiGUNANI Tumraping Liyan

Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat
bisa bermakna besar bagi orang lain.
Berguna bagi sesama membuat hidup lebih berarti

Jl. P. Mangkubumi 40-42-44-46, Yogyakarta 55232

Telp. (0274) 565685 (hunting) Faks. (0274) 563125

E-Mail Redaksi redaksi@kr.co.id

E-Mail Iklan iklankr@kr.co.id

<http://www.kr.co.id>